

**PENENTUAN SUBSEKTOR KUNCI PEMBANGUNAN SEKTOR
PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Dengan Analisis Input-Output Tahun 2004**

**LAPORAN SKRIPSI
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

Oleh :
INSYIAH ZIRATUN
0110840018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN
MALANG
2007**



**PENENTUAN SUBSEKTOR KUNCI PEMBANGUNAN SEKTOR
PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Dengan Analisis Input-Output Tahun 2004**

Laporan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan
Universitas Brawijaya

Oleh :
INSYIAH ZIRATUN
0110840018

Dosen Penguji I

(Ir. EDI SUSILO, MS)

Tanggal:

Dosen Penguji II

(Ir. PUDJI PURWANTI, MP)

Tanggal:

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

(Ir. MIMIT PRIMYASTANTO, MP)

Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Ir. ABDUL QOID, MS)

Tanggal:

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

(Ir. MAHENO SRI WIDODO, MS)

Tanggal:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan Sektor Perikanan Kabupaten Banyuwangi dengan Analisis Input-Output Tahun 2004” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S-1) di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ir. Mimit Primyastanto, MP selaku dosen pembimbing utama, dan Bapak Ir. Abdul Qoid, MS sebagai dosen pembimbing kedua.

Penghargaan yang tulus disampaikan kepada Ir. Edi Susilo, MS dan Ir. Pudji Purwanti, MP., atas saran-sarannya dalam rangka perbaikan skripsi ini, serta kepada ayah dan ibunda atas segala bimbingan dan kesabarannya.

Kami menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak yang berkepentingan, terutama dari Bapak Dosen Pembimbing. Akhirnya kami berharap agar laporan ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dengan topik penelitian yang terkait.

Malang, Agustus 2007

Penulis

RINGKASAN

Insyiah Ziratun. Skripsi tentang Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan Sektor Perikanan Kabupaten Banyuwangi Dengan Analisis Input-Output Tahun 2004. (Dibawah Bimbingan **Ir. Mimit Primyastanto, MP** dan **Ir. Abdul Qoid, MS**)

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang secara geografis mempunyai nilai strategis di bidang perikanan. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yaitu: panjang pantai ± 176 km, areal tambak seluas 961,9 ha, areal kolam ikan seluas 190,9 ha dan panjang sungai ± 735 km (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, 2004). Pengusahaan sumberdaya perikanan laut yang lebih banyak dilakukan di Selat Bali sudah dilakukan secara intensif sehingga dinyatakan padat tangkap, namun di perairan Samudra Indonesia pemanfaatannya masih relatif rendah, begitu juga dengan lahan tambak, sungai, dan perairan umum lainnya.

Tidak meratanya dan kurangnya pemanfaatan sumberdaya perikanan, diperlukan suatu strategi dan perencanaan yang sistematis bagi pembangunan perikanan. Mengingat keterbatasan dana pembangunan perikanan yang tersedia, maka perlu ditentukan satu subsektor dari tiga subsektor perikanan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan ekspor dan menjadi kunci pembangunan perikanan Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai subsektor perikanan di Banyuwangi yang meliputi perikanan laut, tambak, dan perikanan darat dan menentukan subsektor kunci pembangunan perikanan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan ekspor dan memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian kabupaten Banyuwangi saat ini.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini ada dua langkah, yang pertama adalah membuat tabel input output kabupaten Banyuwangi tahun 2004 dengan cara mengkonversi nilai PDRB yang ada pada tabel input output Jawa Timur tahun 2000 dengan PDRB kabupaten Banyuwangi tahun 2004. Langkah kedua adalah menghitung daya penyebaran dan derajat kepekaan dengan menggunakan matriks pengganda. Daya penyebaran dikenal juga dengan istilah *backward linkage* atau tingkat keterkaitan ke belakang, dan derajat kepekaan dikenal dengan istilah *forward linkage* atau tingkat keterkaitan ke depan. Setelah diketahui sub sektor dari sektor perikanan yang menjadi sektor kunci diharapkan akan ditemukan subsektor yang tangguh, yang memiliki keterkaitan sektoral tinggi serta dapat melakukan ekspansi dengan menyerap banyak input sekaligus menjadi input bagi banyak sektor lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi meliputi penangkapan dan budidaya. Daerah penangkapan salah satunya di Selat Bali yang luasnya ± 960 mil² dengan basis utama kecamatan Muncar pada tahun 2004 pemanfaatannya mencapai 103,44% sehingga dinyatakan padat tangkap. Sedangkan Samudra Indonesia yang luasnya ± 2 juta mil² termasuk perairan ZEE 200 mil dengan basis penangkapan di Grajagan, Pancer, Rajegwesi dan Lampon, pemanfaatannya baru mencapai $\pm 0,068\%$ sehingga sangat perlu ditingkatkan lebih lanjut. Budidaya perikanan laut terdiri dari budidaya rumput laut yang memiliki potensi untuk dikembangkan 1600 unit rakit, namun pemanfaatannya hanya 220 unit, dan budidaya di karamba jaring apung memiliki potensi 2250 unit, namun pemanfaatannya

hanya 28 unit. Tambak di Banyuwangi memiliki potensi lahan seluas 2279 ha, sedang pemanfaatannya hanya seluas 1161 ha. Perikanan air tawar terdiri dari budidaya kolam yang memiliki potensi 500 ha sedang pemanfaatannya 199,17 ha, minapadi potensinya 1500 ha, pemanfaatannya baru 123,5 ha, dan karamba sungai memiliki potensi dikembangkan 1500 unit, namun pemanfaatannya hanya 139 unit. Penangkapan ikan di perairan umum meliputi sungai dengan panjang 735 km, waduk dan rawa dengan luas 6,5 ha.

Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis input-output tahun 2004 menunjukkan bahwa subsektor yang memenuhi syarat sebagai subsektor kunci, yaitu subsektor tambak dengan nilai BL sebesar 1,3661 dan FL sebesar 1,2674, sedangkan perikanan laut memiliki nilai BL sebesar 0,9164 dan FL sebesar 1,2587, perikanan air tawar memiliki nilai BL sebesar 0,6017, dan FL sebesar 1,5410. Perikanan laut dan air tawar memiliki nilai BL yang kecil kemungkinan disebabkan barang modal tidak tersedia di wilayah domestik atau tergantung barang impor, sehingga memiliki jumlah transaksi yang kecil, kemudian kemungkinan juga rendahnya upaya peningkatan produksi dengan mengandalkan bantuan sektor lain, sehingga upaya produksi subsektor ini hanya mengandalkan kemampuan faktor-faktor produksinya semata yang hingga saat ini kebanyakan diantaranya masih sangat sederhana dengan kemampuan apa adanya (tradisional). Ketiga Subsektor memiliki nilai FL yang tinggi, kemungkinan karena banyaknya industri pengolahan ikan di Banyuwangi baik industri yang menghasilkan produk yang bisa langsung dikonsumsi atau produk bahan baku bagi sektor usaha yang lain.

Salah satu tujuan penentuan subsektor kunci ini adalah untuk fokus pengalokasian dana pembangunan yang terbatas. Namun bukan berarti subsektor kunci terpilih adalah subsektor yang bisa dijadikan patokan strategi jangka panjang, dengan hanya menggunakan data input-output sebagai sumber data analisis, subsektor tambak hanya efektif bagi upaya perbaikan dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sektor perikanan mencakup 3 subsektor besar, yaitu subsektor perikanan laut, tambak, dan perikanan air tawar. Ketiga subsektor tersebut memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Tambak merupakan subsektor kunci pembangunan perikanan Banyuwangi, dengan nilai BL sebesar 1,3661 dan FL sebesar 1,2674. Penggunaan data input output sebagai sumber data analisis ternyata membatasi ruang analisis hanya pada kondisi data yang dipergunakan. Hal ini melihat kelemahan data input output yang sifatnya statis sehingga tidak dapat melihat gejolak perekonomian di antara periode data input output terlebih untuk memprediksi kondisi ke depan.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah agar subsektor tambak dapat menunjukkan fungsi strategisnya dalam membantu pembenahan perekonomian Banyuwangi ini maka perlu didukung dengan kebijakan yang berdampak langsung pada produksi subsektor tambak maupun melalui intensifikasi produksi sektor-sektor komplementernya dengan memanfaatkan hubungan interdependensi terhadap subsektor tambak. Perlunya menumbuhkembangkan potensi subsektor perikanan yang lain, sehingga sektor perikanan bisa menjadi sektor kunci pembangunan Banyuwangi secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial. Perlu kiranya dilakukan perluasan penelitian di bidang perikanan, khususnya subsektor tambak, agar didapatkan hal-hal baru yang dapat menunjang perkembangan subsektor ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah	4
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Ekonomi Makro	7
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Sektor Perikanan	11
2.3.1 Pengertian Sektor Perikanan	11
2.3.2 Pembangunan Perikanan	11
2.4 Teori Perencanaan Pembangunan	12
2.4.1 Pengertian dan Peranan Perencanaan Pembangunan	13
2.4.2 Perencanaan Pembangunan Perikanan	14
2.4.3 Subsektor Kunci	15
2.5 Input Output	16
2.5.1 Definisi Tabel Input Output	16
2.5.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Input Output	17
2.5.3 Asumsi Dasar Model Input output	19
2.6 Kerangka Pemikiran	24
3. METODOLOGI	27
3.1 Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	28

3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Analisa Data	28
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	37
4.1.1 Keadaan Geografis Daerah	37
4.1.2 Keadaan Topografi dan Jenis Tanah	37
4.1.3 Iklim	37
4.1.4 Keadaan Wilayah Laut, Pantai dan Sungai	38
4.1.5 Keadaan Sosial Ekonomi	39
4.2 Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Banyuwangi	40
4.2.1 Perikanan Laut	40
4.2.2 Tambak	42
4.2.3 Perikanan Air Tawar	43
4.3 Tinjauan Makro Ekonomi Perikanan Kabupaten banyuwangi	44
4.3.1 Struktur Permintaan Sektor Perikanan	44
4.3.2 Struktur Penawaran Sektor Perikanan	45
4.3.3 Struktur Output	46
4.3.4 Struktur Nilai Tambah Bruto	47
4.3.5 Struktur Permintaan Akhir	48
4.4 Hasil Perhitungan Keterkaitan Sektoral	49
4.4.1 Keterkaitan Ke Belakang	50
4.4.2 Keterkaitan Ke Depan	51
4.5 Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan Perikanan	52
4.6 Tambak Sebagai Subsektor Kunci Pembangunan Perikanan	54
5. KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
6. DAFTAR PUSTAKA	63
7. LAMPIRAN	65

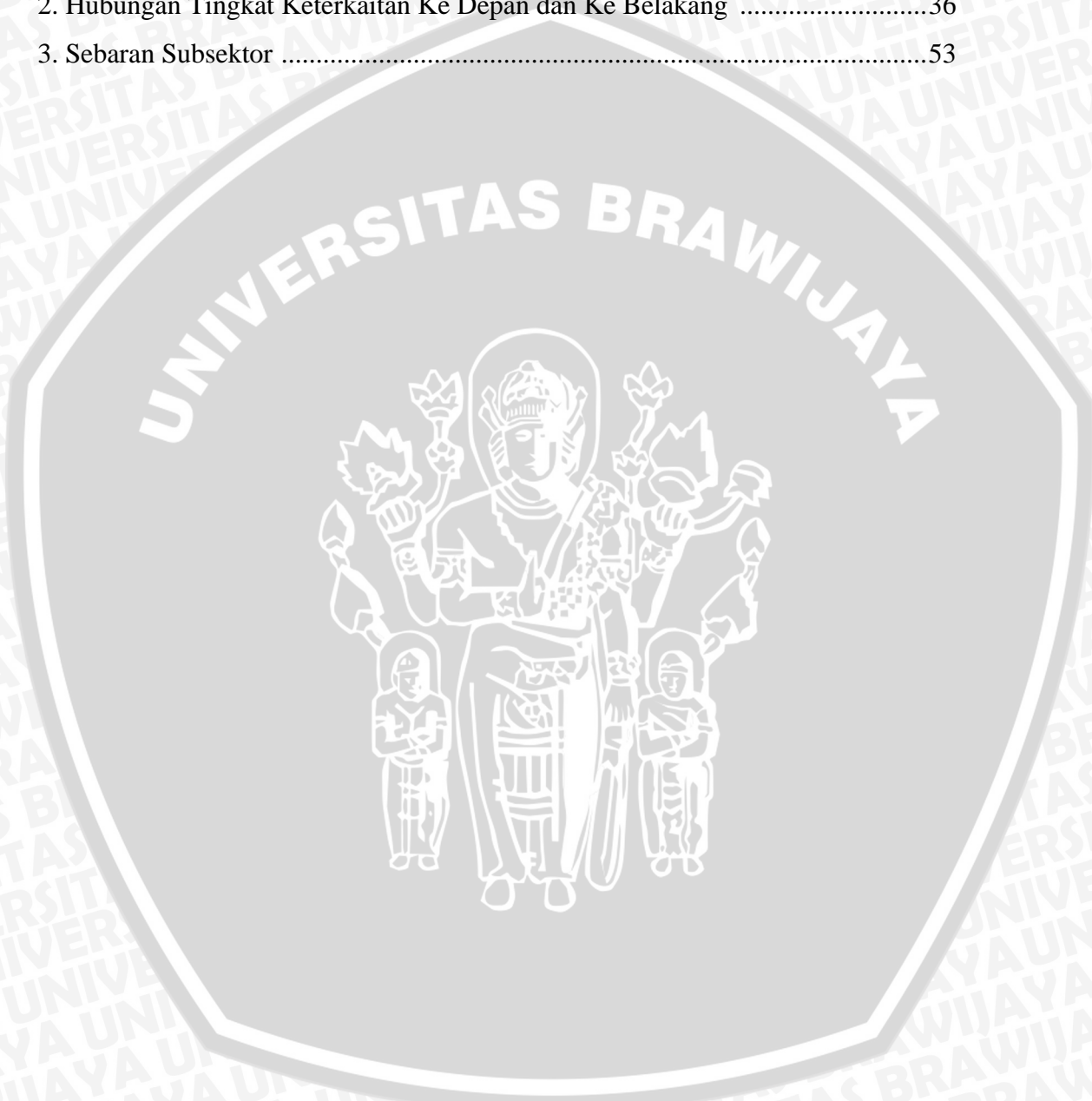
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Transaksi Input Output 3 Sektor	19
2. Matriks Input Output 12 x 12 Sektor	25
3. Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2004	34
4. Banyaknya Rumah Tangga dan Luas Areal Tambak Menurut Kecamatan	38
5. Struktur Permintaan Sektor Perikanan Banyuwangi Tahun 2004	41
6. Struktur Penyediaan Hasil Perikanan Banyuwangi Tahun 2004	42
7. Nilai Tambah Bruto (PDRB) Sektor Perikanan Tahun 2004	44
8. Struktur Permintaan Akhir Sektor Perikanan Tahun 2004	45
9. Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan Banyuwangi	48



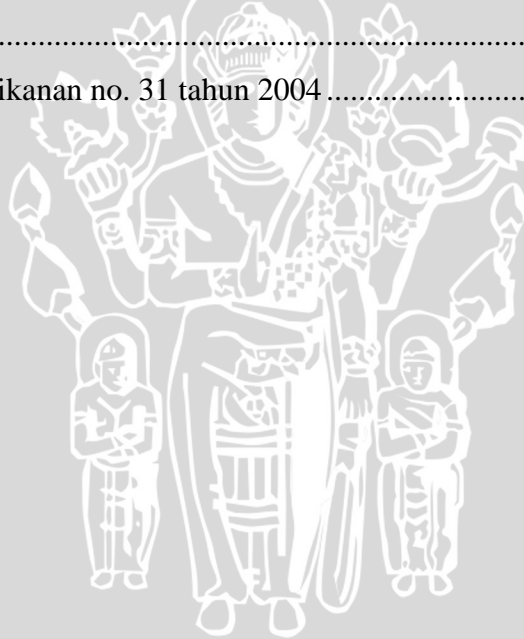
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran	26
2. Hubungan Tingkat Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang	36
3. Sebaran Subsektor	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Banyuwangi	65
2. Jumlah Penduduk, Petani Ikan dan Nelayan Banyuwangi	66
3. Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Perikanan Banyuwangi	67
4. Banyaknya Rumah Tangga dan Luas Areal Budidaya Air Tawar.....	68
5. Produksi Budidaya Tambak Kabupaten Banyuwangi	69
6. Hasil Perhitungan Keterkaitan Sektorial Kabupaten Banyuwangi	70
7. Tabel Input Output Jawa Timur Tahun 2000	71
8. Tabel Koefisien Input	72
9. Tabel Input Output Banyuwangi Tahun 2004	73
10. Klasifikasi Sektor	74
11. Undang-Undang Perikanan no. 31 tahun 2004	75



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melilit bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menurut Dahuri (2002), merupakan akibat dari adanya penerapan kebijakan ekonomi makro yang kurang tepat, yakni kebijakan yang lebih mengembangkan sektor industri dengan teknologi tinggi dan mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku impor. Untuk menghadapi hal tersebut, kedepan pemerintah melakukan re-orientasi kebijakan ekonomi makro yang lebih memberikan perhatian untuk mengembangkan industri yang berbasis pada sumber daya, yang memang merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia.

Dua per tiga dari wilayah Indonesia berupa lautan, kondisi wilayah yang demikian, jelas mengandung sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya yang tidak dapat pulih yakni: minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional (*Ocean Thermal Energy Convention/OETC*), maupun sumber daya yang dapat pulih, berupa ikan. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau.

Sektor perikanan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan, sejak PELITA VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal PELITA VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sektor lain, seperti hutan, karena pada masa tersebut hutan masih mempunyai potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, namun setelah hutan ditebang habis dan sumber minyak dan gas bumi baru sulit ditemukan di daratan, pemerintah Orde Baru mulai berpaling kepada sektor perikanan (Budiharsono, 2001).

Peluang pembangunan sektor perikanan pada masa mendatang cukup cerah, hal ini terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri. Menurut Budiharsono (2001) permintaan pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga komoditi substitusi, selera, mutu, dan citra dari produk perikanan yang dipasarkan. Dengan proyeksi jumlah penduduk yang semakin meningkat dan perekonomian Indonesia mulai pulih pada tahun 2004, maka permintaan domestik terhadap produk perikanan dan hasil olahannya akan cukup cerah.

Dalam era globalisasi saat ini, menurut Fauzi (2005), perdagangan international produk perikanan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Laporan FAO menunjukkan bahwa nilai ekspor produk perikanan telah meningkat dari US\$ 15 miliar pada tahun 1980-an menjadi US\$ 56 miliar pada awal tahun 2000-an. Pada kurun waktu tersebut, *share* negara-negara berkembang terhadap ekspor total juga meningkat dari 40% menjadi 50%, sementara negara-negara maju masih mendominasi impor yang saat ini menguasai hampir 80% total impor dunia. Ekspor produk perikanan dalam perdagangan internasional merupakan penerimaan devisa yang sangat berarti bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Secara global, penerimaan devisa dari ekspor ini pun mengalami peningkatan tajam, dari di bawah US\$ 4 miliar pada dekade 1980-an menjadi lebih dari US\$ 18 miliar saat ini, bahkan nilai ekspor ini melebihi nilai ekspor komoditas pertanian lainnya seperti kopi, beras, dan teh.

Permintaan pasar yang semakin meningkat tersebut selain diperlukan peningkatan teknologi yang dapat meningkatkan hasil perikanan juga diperlukan strategi pembangunan perikanan yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup sehingga bisa berjalan secara berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung Timur Pulau Jawa, secara geografis mempunyai nilai strategis di bidang perikanan. Potensi sumberdaya perikanan laut di kabupaten Banyuwangi terdiri dari potensi sumberdaya perikanan Samudra Indonesia dan Selat Bali, dengan panjang pantai ± 176 km. Selain itu juga terdapat sungai dengan panjang ± 735 km dan juga waduk serta rawa yang salah satunya dimanfaatkan untuk perikanan (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, 2004).

Keberadaan sumber daya perikanan tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan disamping untuk memperluas lapangan kerja baru sekaligus mengurangi kemiskinan.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 164 disebutkan: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”* dan juga dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 29 disebutkan: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Menurut Adisasmita (2006), agar pembangunan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasarannya, harus ditunjang oleh penyusunan rencana yang komprehensif dan

terarah. Penyusunan rencana atau perencanaan itu merupakan suatu alat atau cara untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dengan baik. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarah dan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan perencanaan dilakukan perkiraan (*forecaseting*) mengenai potensi, prospek, hambatan dan resiko yang dihadapi. Dengan perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif yang terbaik (*the best alternative*) dan memilih kombinasi yang terbaik (*the best combination*). Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil perikanan yang melimpah dan memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, mengingat keterbatasan dana pembangunan perikanan yang tersedia, maka diperlukan perhatian khusus terhadap salah satu usaha di sektor perikanan.

Berdasar latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengidentifikasi subsektor kunci perikanan yang nantinya dapat menumbuhkan sektor perikanan sehingga memberikan dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja di sektor lain yang terkait, serta dengan keterbatasan yang ada, pemerintah Banyuwangi mampu merencanakan alokasi dana yang tersedia dengan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan analisis input-output tahun 2004.

1.2. Perumusan Masalah

Sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan perikanan tahun 1999, perikanan tidak lagi menjadi subsektor pada sektor pertanian melainkan telah menjadi salah satu sektor yang kedudukannya sama dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini berimplikasi terhadap besarnya peluang, harapan dan tantangan yang diberikan agar dapat memberi kontribusi

yang lebih besar terhadap peningkatan dan pencapaian beberapa target yang dibebankan (Yahya Ali, 2001).

Sektor perikanan Banyuwangi dibagi menjadi tiga subsektor besar, yaitu perikanan laut, tambak, dan perikanan air tawar. Subsektor perikanan laut mendominasi kegiatan perikanan di kabupaten Banyuwangi dan menjadi andalan pendapatan kabupaten Banyuwangi (Kompas, 2003). Pengusahaan sumberdaya perikanan laut yang lebih banyak dilakukan di Selat Bali sudah dilakukan secara intensif sehingga dinyatakan padat tangkap, namun di perairan Samudra Indonesia dan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) 200 mil masih relatif rendah sehingga perlu ada perintisan dan ditingkatkan beberapa kali lipat. Begitu juga dengan potensi sungai, waduk, dan rawa. Menurut SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor. 350 tahun 1987, luas areal pengembangan tambak adalah seluas ± 2.279 hektar, namun yang ada masih seluas 1.762,195 Ha (77,31 %) dan yang dikelola seluas 1.140 Ha sehingga masih memungkinkan pengembangan lebih lanjut (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, 2005).

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum sektor perikanan di Kabupaten banyuwangi dan keadaan perekonomian sektor perikanan di Kabupaten banyuwangi tahun 2004.
2. Dari ketiga subsektor perikanan tersebut, subsektor mana yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan ekspor dan menjadi kunci pembangunan perikanan Banyuwangi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain untuk :

1. Mengetahui gambaran umum mengenai tiga subsektor perikanan di Kabupaten Banyuwangi yaitu perikanan laut, tambak, dan perikanan air tawar dan keadaan perekonomiannya.
2. Menentukan subsektor kunci pembangunan perikanan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan ekspor dan memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian kabupaten Banyuwangi saat ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Banyuwangi dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektor perikanan.
2. Sebagai pustaka bagi akademisi yang ingin belajar untuk memahami salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan.
3. Sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang berkaitan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :

- Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
- Sumber daya tersedia secara terbatas.
- Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (*opportunity cost*).

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.

Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :

- Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut *full employment*. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan *under employment* atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.

- Sejahtera mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
- Sejahtera mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat *trade off* maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

Kegiatan ekonomi di masing-masing negara dihitung melalui perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) (*Gross Domestic Product*), Produk Nasional Bruto (PNB) (*Gross National Product*), maupun Pendapatan Nasional (PN) (*National Income*).

PDB adalah nilai seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan oleh siapapun di dalam wilayah teritorial suatu negara selama periode waktu satu tahun. PNB adalah nilai seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara suatu negara selama periode waktu satu tahun.

$PDB - \text{balas jasa faktor produksi secara netto yang mengalir ke luar negeri} = PNB.$

$PNB - \text{penyusutan} = \text{Produk Nasional Netto (PNN)}.$

$PNN - \text{pajak tidak langsung} = \text{Pendapatan Nasional}$

Perhitungan PDB/PNB/PNN/PN dapat mempergunakan harga yang berlaku maupun harga konstan. Perhitungan dengan harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu yang tergolong tahun yang stabil. Perhitungan dengan harga konstan berarti sudah terbebas dari pengaruh inflasi/deflasi (Heriyanto, 1999)

Para ekonom dan perencana pembangunan biasanya menggunakan PDB dan PDRB dalam merumuskan target-target pertumbuhan sektoral. Namun untuk merumuskan suatu rencana pembangunan yang menyeluruh dan konsisten antar sektor yang satu

dengan sektor yang lain, penggunaan data PDB atau PDRB saja terbukti masih kurang memadai. Ini terutama diakibatkan karena data PDB dan PDRB tidak memperlihatkan interaksi (keterkaitan) antarsektor secara eksplisit. Keterkaitan antarsektor menjadi pusat perhatian para perencana dan ekonom yang ingin selalu menjaga keseimbangan ekonomi makro. Disinilah letak pentingnya memahami tabel input-output (I-O) (Kuncoro, 2000).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hidajat (2000), dalam penelitiannya yang berjudul penentuan sektor kunci sebagai dasar industrialisasi di Indonesia dalam rangka pemulihan perekonomian Nasional (Studi Perencanaan Multisektoral berdasarkan tabel input-output sejak tahun 1985-1995), menemukan empat sektor usaha yang memiliki kredibilitas sektor kunci. Empat sektor tersebut, yaitu: jagung, sektor tanaman bahan makanan lainnya, tembakau, dan perdagangan. Sektor-sektor ini dinilai paling mampu menghidupkan kembali perekonomian Indonesia, dinilai dari kemampuan keterkaitan dan kemampuan memberdayakan jumlah tenaga kerja yang tinggi di antara sektor usaha lainnya. Dengan kata lain sektor-sektor kunci merupakan sektor usaha yang paling mampu menggerakkan produksi mayoritas sektor-sektor usaha dalam perekonomian nasional, dan mampu memberdayakan paling banyak tenaga kerja. Secara umum sektor primer merupakan jenis sektor usaha yang memiliki kemampuan di atas, sehingga patut menjadi prioritas alokasi investasi dalam agenda penyembuhan sektor riil perekonomian Indonesia.

Henryk Gurgul dan Pawel Majdosz (2005), pun memberikan perlakuan yang sama untuk menentukan arah perubahan struktur ekonomi Polandia. Perlakuan pertama adalah dengan menentukan matriks pengganda input-output dengan rumus dasar:

$$X = (I - A)^{-1} y = B_y$$

Dengan,

$$B_{i\bullet} = \sum_{j=1}^n b_{ij}$$

$$B_{\bullet j} = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

$$V = \sum_{i,j=1}^n b_{ij}$$

maka didapatkan formula matriks pengganda sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{V} [B_{i\bullet} \cdot B_{\bullet j}] = \frac{1}{V} \begin{bmatrix} B_{1\bullet} \\ B_{2\bullet} \\ \vdots \\ B_{n\bullet} \end{bmatrix} [B_{\bullet 1}, B_{\bullet 2}, \dots, B_{\bullet n}] = [m_{ij}]$$

kemudian dilanjutkan dengan *backward linkage* (BL) dan *forward linkage* (FL):

$$BL_j = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n B_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n B_{ij}} = \frac{nB_{\bullet j}}{V}$$

$$FL_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n B_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n B_{ij}} = \frac{nB_{i\bullet}}{V}$$

Dimana :

A = matriks koefisien input domestik (yang diperoleh dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen)

BL = Tingkat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*)

FL = Tingkat keterkaitan ke depan (*forward linkage*)

B_{ij} = dampak yang terjadi terhadap output sektor i akibat perubahan permintaan akhir sektor j

n = jumlah matriks

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Qing Zhang dan Bruce Felmingham (2002) untuk menentukan sektor kunci pertumbuhan dari ekonomi PRC (*People's Republic of China*). Sektor kunci diidentifikasi dengan menerapkan dua turunan teknik modeling terhadap model input output PRC di tahun 1997. Model I dengan mengidentifikasi sektor kunci baik *backward* maupun *forward linkage* dengan rumus dasar. Model II mengubah model I dengan efek pembobotan pada setiap kontribusi industri terhadap GDP PRC. Hasil akhir dari penelitian tersebut adalah sektor energi dan infrastruktur bergabung dengan sektor pertanian merupakan sektor kunci pembangunan ekonomi Cina.

2.3 Sektor Perikanan

2.3.1 Pengertian Sektor Perikanan

Pengertian perikanan menurut UU no.31 tahun 2004 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam penelitian ini sektor perikanan kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi tiga subsektor yaitu: subsektor perikanan laut, perikanan tambak, dan perikanan darat, pembagian ini disesuaikan dengan tabel input-output Jawa Timur tahun 2000 dalam klasifikasi 100 sektor.

2.3.2 Pembangunan Perikanan

Pandangan yang cukup populer oleh Todaro (1994) menyatakan bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang multidimensional tersusun dan terencana

secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru. Di sisi lain Saul M. Kant menganggap bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu kondisi nasional tertentu kepada kondisi nasional lain yang dianggap lebih menyejahterakan. Pembangunan lebih merupakan sebuah transformasi pada segala bidang kehidupan untuk menuju keadaan lebih baik. Pembangunan merupakan sebuah kemajuan dan perubahan yang oleh beberapa ahli diartikan sebagai proses perubahan sosial (Hanani *et.all*, 2003).

Indonesia sebagai negara yang merdeka telah memulai pembangunan terencana melalui Pembangunan Lima Tahun I hingga sekarang. Dalam pembangunan nasional, pembangunan perikanan merupakan salah satu agenda penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (81.000 km) setelah Kanada serta kekayaan alam laut yang besar dan beranekaragam, sehingga hal ini menjadi peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk menyokong kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara, maka pemerintah telah menempuh beberapa upaya dengan mengatur kebijakan serta program-program di bidang perikanan.

2.4 Teori Perencanaan Pembangunan

Untuk mencapai suatu bentuk keberhasilan dalam setiap pengelolaan pembangunan, perlu disusun suatu perencanaan yang terinci, detail, dan jelas sejak awal pelaksanaan kegiatan, dengan harapan nanti pada akhirnya dapat memperhitungkan segala hal yang

dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian, sehingga perencana dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi agar tujuan tersebut dapat tercapai.

2.4.1 Pengertian dan Peranan Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli manajemen, sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (1988) dalam, Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Louis A. Allen mengemukakan perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. George R. Terry menyatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sedangkan pengertian perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987) adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Unsur-unsur perencanaan menurut LAN-DSE (1999) dalam Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2005) dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan.
 - Memilih prioritas.
 - Memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya.

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan anggaran.
 - Pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan.
 - Tujuan harus jelas (ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya).
 4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
 5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu)
 - Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

2.4.2 Perencanaan Pembangunan Perikanan

Pembangunan perikanan, selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perikanan, juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan, serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, dan memperkuat ketahanan pangan nasional, serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumber daya perikanan. Di sisi lain pembangunan perikanan dituntut untuk menjaga kelestarian sumber dayanya.

Di Indonesia, badan yang berwenang untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional saat ini adalah Bappenas yang dulunya bernama Depernas (Dewan Perancang Nasional). Kegiatan perencanaan pembangunan ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, namun juga dilakukan di tingkat Daerah Tingkat I, Kabupaten atau Kotamadya, Kecamatan dan Desa.

Sementara itu, struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor yang satu sama lainnya saling berinteraksi melalui transaksi jual beli. Artinya, tak ada perusahaan,

industri ataupun sektor dalam perekonomian yang hidup dalam isolasi. Masing-masing memiliki ketergantungan dengan perusahaan atau sektor lain sebagai sumber input maupun sebagai pasar bagi outputnya. Output dari suatu sektor akan dipergunakan oleh sektor itu sendiri dan juga oleh sektor lainnya sebagai input. Dan sebaliknya, output dari sektor tersebut memerlukan output sektornya sendiri dan output sektor-sektor lainnya (Nasendi, 1986).

Sektor perikanan, merupakan sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan. Jika diambil contoh sektor perikanan secara umum (yang terdiri dari subsektor perikanan laut, perikanan tambak, dan perikanan darat), maka terlihat bahwa output subsektor tambak bisa digunakan oleh subsektor tambak itu sendiri, misalnya dalam bentuk benih dan bibit. Selain itu, output subsektor tambak juga bisa digunakan pada subsektor industri pengolahan, misalnya untuk industri makanan kerupuk ikan.

Lebih luas lagi misalnya dalam perekonomian suatu negara yang terdiri dari sektor pertanian, industri, pertambangan, dan sebagainya. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perkembangan atau pertumbuhan suatu subsektor atau sektor akan tergantung kepada subsektor atau sektor yang lain.

Untuk mensukseskan pembangunan perikanan, maka perlu kiranya dilakukan suatu perencanaan. Dan untuk mengoptimalkan perencanaan serta alokasi anggaran dana yang tepat sasaran, maka perlu adanya identifikasi terhadap subsektor kunci yang dapat memicu pertumbuhan, baik pertumbuhan subsektornya sendiri, maupun sektor lain yang terkait dengannya.

2.4.3 Subsektor Kunci

Sedang beberapa peneliti merujuk pada metode penentuan sektor kunci Hirschman dan Rasmussen, yaitu melalui derajat keterkaitan antar sektor. Mereka menafsirkan

sektor kunci atau *key sector* sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan lebih dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

Dengan tujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan perikanan Banyuwangi, maka pengertian subsektor kunci yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu subsektor di bidang perikanan yang memiliki keterkaitan sektor tinggi, baik keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Hal tersebut dapat diketahui dengan pengukuran daya penyebaran dan derajat kepekaan masing-masing subsektor yang dimaksud. Hasil dari perhitungan tersebut akan memperlihatkan subsektor yang mampu berperan aktif dalam rangka menjalankan roda perekonomian Banyuwangi, sehingga diketahui subsektor kunci perikanan yang jika dilakukan pemberdayaan atasnya akan dapat menjadi poin penting dalam perencanaan pembangunan perikanan Banyuwangi.

2.5 Input Output

Tabel I-O dan analisisnya pertama kali dikembangkan oleh Professor Wassily Leontief pada akhir dekade 1930an. Untuk pengembangan tersebut, ia memenangkan hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1973. Di Indonesia, tabel I-O mulai dikenal pada akhir Pelita I (Nasendi, 1986).

2.5.1 Definisi Tabel Input-Output

Tabel I-O pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar-satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Isian sepanjang baris dalam matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomi dialokasikan ke sektor-sektor lainnya untuk memenuhi permintaan

antara dan permintaan akhir, sedangkan isian dalam kolom menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya (BPS, 1995).

2.5.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Input-Output

Dalam keperluan perencanaan makro, diperlukan suatu analisis yang mencakup nilai dari beberapa peubah atau respons secara menyeluruh, yaitu hasil pendugaan atau analisis berupa vektor dimana komponen-komponennya merupakan peubah-peubah tidak bebas. Dengan penerapan teknik analisis melalui model input-output ini maka akan dapat diketahui secara keseluruhan, sektor mana yang terdapat kelemahan atau kekurangan dan sektor mana yang kelebihan output. Karena teknik ini dapat langsung menjawab permasalahan berapa besarnya output atau produksi yang memadai dari suatu sektor ekonomi yang seyogyanya dapat disesuaikan dengan besarnya permintaan pasar dan tersedianya input.

Manfaat lainnya dari penggunaan model input-output dalam perencanaan makro menurut Nasendi (1986) adalah:

1. Model Input-Output dapat memberikan diskripsi yang detail mengenai perekonomian nasional ataupun perekonomian regional dengan mengkwantifikasikan ketergantungan antar sektor dan asal (sumber) dari ekspor dan impor.
2. Untuk suatu set permintaan akhir dapat ditentukan besarnya output dari setiap sektor, dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya.
3. Dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang disebabkan oleh swasta maupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan secara terperinci.
4. Perubahan-perubahan teknologi dan harga relatif dapat diintegrasikan ke dalam model melalui perubahan koefisien teknik.

Akan tetapi, dibalik keunggulannya, penggunaan model Input-Output memiliki beberapa kelemahan di dalam perencanaan makro. Seperti yang disampaikan Kuncoro (2001), meskipun tabel Input-Output mampu menggambarkan aliran antar sektor, namun tabel ini kurang mampu menjelaskan kondisi di balik angka aliran antar sektor tersebut. Dari perspektif ini, tabel Input-Output merupakan refleksi dari fungsi produksi. Hanya saja fungsi dalam konteks ini berbeda dengan fungsi produksi sebagaimana digunakan dalam teori ekonomi yang baku. Dilihat dari sudut teori produksi, model Input-Output memiliki dua elemen pokok yang saling berhubungan erat, yaitu: konsep sektor produktif dan karakteristik struktur input untuk masing-masing sektor.

Dalam model Input-Output, suatu sektor produktif diidentikkan dengan suatu proses atau aktivitas produksi. Perekonomian dianggap merupakan kumpulan dari sektor-sektor semacam itu. Pembagian menjadi berbagai sektor dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing sektor (proses produksi) hanya menghasilkan satu produk. Ini berarti tidak ada produk gabungan (*joint product*). Dengan demikian, asumsi dalam analisis Input-Output adalah: Pertama, karena setiap produk berasal dari satu sektor maka diasumsikan hanya diproduksi dengan satu cara. Ini berarti tidak diperhitungkan masalah pilihan teknologi.

Kedua, diasumsikan tidak ada interaksi antar sektor. Ini berarti mengabaikan masalah *external economies* dan *diseconomies* dari suatu proses produksi. Implikasinya, efek total dari seluruh sektor merupakan asumsi dasar analisis Input-Output, maka jumlah input yang digunakan oleh suatu sektor merupakan penjumlahan dari efek masing-masing sektor. Apabila fungsi produksi sektoral merupakan asumsi dasar analisis Input-Output, jumlah input yang digunakan oleh suatu sektor tergantung dari tingkat output sektor tersebut. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa kenaikan

penggunaan input berbanding secara proporsional dengan kenaikan output. Proporsi yang konstan ini ditunjukkan oleh koefisien Input-Output.

Ketiga, berlaku *non-substitution theorem*, yaitu dengan koefisien produksi yang tetap, tidak ada substitusi antar input dalam produksi komoditi tertentu. Implikasinya, masing-masing aktivitas produktif merupakan milik sektor tertentu, dan sektor tersebut hanya memiliki satu teknik produksi.

Keempat, model Input-Output pada hakekatnya merupakan model statik, dengan penggunaan utamanya adalah dalam jangka pendek. Artinya, penggunaan model Input Output mengasumsikan koefisien Input-Output tidak berubah selama periode tertentu. Misalnya, suatu analisis dampak yang menggunakan Input-Output untuk proyeksi selama beberapa tahun mengasumsikan koefisien Input-Output stabil sepanjang periode tersebut. Secara implisit, ini identik dengan asumsi *constant returns to scale* atau linearitas. Asumsi ini tidak berlebihan mengingat (1) dampak awal relatif kecil dibanding skala industri dan total kegiatan ekonomi yang diamati; (2) dampak yang diukur telah merupakan bagian dari perekonomian.

Selain itu, Nasendi (1986) juga menyatakan tentang beberapa kelemahan penggunaan model Input-Output ini, yaitu:

1. Biaya yang relatif besar terutama dalam pengumpulan data
2. Sulitnya mendapat data pokok yang secara memadai
3. Keterbatasan dalam kemampuan teknis karena model ini memiliki beberapa asumsi dasar.

2.5.3 Asumsi Dasar Model Input-Output

Dalam suatu model input-output yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O harus memenuhi tiga asumsi dasar, yaitu

asumsi homogenitas, proporsionalitas dan aditivitas. Asumsi homogenitas mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal, dan bahwa tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor. Asumsi proporsionalitas mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linier yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut. Sedangkan asumsi aditivitas mensyaratkan bahwa efek total pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah, yang berarti bahwa di luar sistem input-output semua pengaruh dari luar diabaikan (BPS, 1995).

Dengan asumsi-asumsi tersebut di atas, model input-output ini dapat diterapkan secara empiris untuk keperluan analisis perencanaan. Untuk itu, membutuhkan penyusunan tabel dasar, yaitu:

1. Tabel Transaksi atau Tabel Input-Output

Tabel transaksi mencatat produksi dan penggunaan barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi pada suatu periode waktu (biasanya satu tahun). Tabel ini memberikan gambaran sangat rinci mengenai struktur ekonomi dan dasar analisis hubungan antar sektor. Ini dilakukan dengan disagregasi produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian ke dalam sejumlah industri atau sektor, dan mencatat transaksi antar sektor.

Dalam pendekatan I-O harus dipahami bahwa produksi suatu sektor tidak hanya dipengaruhi oleh input primer, tetapi juga oleh barang dan jasa antara yang dihasilkan oleh sektor lain dan digunakan oleh sektor tersebut sebagai input. Dengan tabel I-O akan terlihat berapa output suatu sektor, berapa bagian output yang dijual ke sektor lain sebagai bahan mentah, dan berapa yang langsung habis dikonsumsi oleh pengguna akhir.

Tabel input-output disebut juga tabel transaksi (aliran) karena mencatat aliran (transaksi) produksi dan penggunaan barang dan jasa dalam suatu struktur ekonomi.

Tabel input-output terdiri dari empat bagian atau kuadran. Kuadran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa di sini adalah penggunaan untuk diproses kembali, baik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karenanya transaksi yang digambarkan dalam kuadran pertama ini disebut juga transaksi antara (*intermediate transaction*).

Kuadran dua menunjukkan permintaan akhir (*final demand*) dan impor, serta menggambarkan penyediaan barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi digolongkan sebagai permintaan akhir. Permintaan akhir ini biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor.

Kuadran tiga memperlihatkan input primer sektor-sektor produksi. Input ini dikatakan primer karena bukan merupakan bagian dari output suatu sektor produksi seperti pada kuadran pertama dan kedua. Input primer adalah semua balas jasa faktor produksi dan meliputi upah dan gaji, surplus usaha ditambah penyusutan dan pajak tidak langsung.

Kuadran empat memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi di kuadran empat ini merupakan transaksi yang tidak secara langsung berkaitan dengan sistem produksi regional (Kuncoro, 2000). Informasi ini juga bukan merupakan tujuan pokok, sehingga dalam penyusunan tabel input-output kadang-kadang diabaikan. Demikian juga penyusunan tabel I-O di Indonesia mengabaikan kuadran keempat ini.

Dalam proses penyusunan tabel I-O diperlukan suatu tahapan untuk mengelompokkan barang dan jasa ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Proses pengelompokkan barang dan jasa ini dikenal sebagai proses klasifikasi sektor. Dalam praktek penyusunan tabel I-O, klasifikasi sektor harus dilakukan pada tahap awal.

Tabel 1. Tabel Transaksi Input-Output 3 Sektor

Struktur Input	Alokasi Output		Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output
	Sektor Produksi						
	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3				
Input Antara	Kuadran I			Kuadran II			
Sektor 1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	F_1	X_1		
Sektor 2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	F_2	X_2		
Sektor 3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	F_3	X_3		
Input Primer	Kuadran III						
	V_1	V_2	V_3				
Jumlah Input	X_1	X_2	X_3				

Tabel 1 memperlihatkan suatu perekonomian sederhana dengan 3 sektor. Masing-masing sektor dalam tabel ini muncul dua kali, sebagai penghasil output dan sebagai pengguna input. Baris dari tabel ini menunjukkan penjualan atau penggunaan output yang dihasilkan oleh tiap sektor. Dengan kata lain, setiap baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dimanfaatkan, apakah dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara (masih digunakan dalam proses produksi lebih lanjut) ataukah sebagai permintaan akhir (langsung dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan). Sebagai contoh, sektor 1 menjual sebesar x_{11} kepada perusahaan lain dalam sektor yang sama, sebesar x_{12} , sebesar x_{12} kepada sektor 2, dan sebesar x_{13} kepada sektor 3. Total produksi (output) sektor ini adalah X_1 , dan penggunaan untuk permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor) sebesar F_1 .

Masing-masing kolom menunjukkan input yang dibeli masing-masing sektor dari sektor lain. Setiap kolom menunjukkan darimana asal input yang digunakan oleh suatu

sektor, apakah sebagai input antara ataukah sebagai input primer (nilai tambah). Dalam tabel 2, sektor 1 membeli dari perusahaan lain dalam sektor yang sama sebesar x_{11} , sebesar x_{21} dari sektor 2, dan sebesar x_{31} dari sektor 3. Selain itu, sektor pertanian juga membeli sebesar V_1 dalam bentuk input primer (meliputi upah dan gaji, surplus usaha ditambah penyusutan dan pajak tidak langsung).

2. Tabel Koefisien Input

Tabel koefisien input menggambarkan tingkat kebutuhan daripada masing-masing sektor menurut kolom, untuk menghasilkan produknya satu unit (dinyatakan dalam nilai uang) terhadap produk sektor-sektor lainnya sebagai input. Jadi menggambarkan struktur input masing-masing sektor yang tercantum pada bagian atas tabel.

Dibedakan atas koefisien input antara dan koefisien input primer. Koefisien input antara menggambarkan struktur input yang berasal dari produk sektor-sektor lain, sedangkan koefisien input primer menggambarkan struktur input yang berupa faktor-faktor produksi primer.

3. Tabel Koefisien Langsung dan Tidak Langsung

Besarnya nilai nyata kaitan antar sektor ini digambarkan dalam tabel transaksi, sedangkan besarnya nilai atau derajat kaitan per unit output (produk) masing-masing sektor digambarkan dalam tabel koefisien input. Nilai atau derajat kaitan yang digambarkan dalam tabel koefisien input tersebut, merupakan kaitan langsung dari setiap peningkatan produk atau kenaikan permintaan akhir satu unit masing-masing sektor.

Akan tetapi, kaitan tersebut tidak terbatas pada tahap pertama atau yang langsung saja. Produk yang digunakan sebagai input pada tahap pertama, akan membutuhkan juga produk sektor-sektor lainnya sebagai input dalam proses produksinya. Kaitan ini merupakan kaitan tahap kedua. Kaitan demikian ini berantai terus ke tahap ketiga dan

seterusnya sampai nilai kaitan itu tidak nampak lagi. Mulai dari kaitan tahap kedua dan seterusnya merupakan kaitan tidak langsung. Dengan demikian kaitan pada tahap pertama dan seterusnya merupakan kaitan langsung dan tidak langsung, dan inilah yang digambarkan dalam tabel koefisien saling ketergantungan antar sektor yang dimaksud di atas.

Salah satu metode analisis yang dikenal adalah perhitungan daya penyebaran dan derajat kepekaan dengan menggunakan matriks pengganda. Daya penyebaran dikenal juga dengan istilah *backward linkage* atau tingkat keterkaitan ke belakang, dan derajat kepekaan dikenal dengan istilah *forward linkage* atau tingkat keterkaitan ke depan.

Backward linkage merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbang input kepadanya. Sedangkan *forward linkage* merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan antara suatu sektor yang menghasilkan output, untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor yang lain (Kuncoro, 2001).

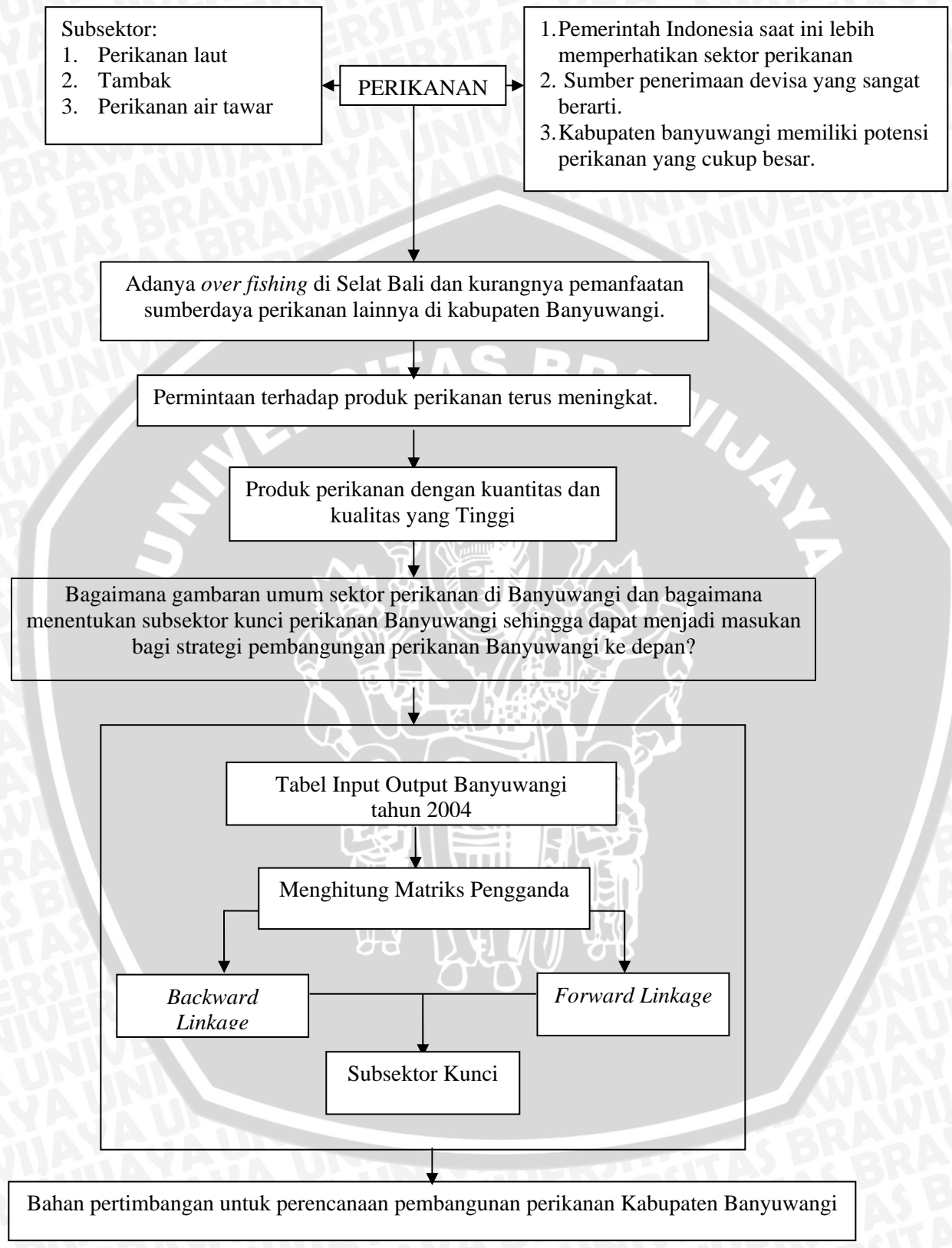
2.6 Kerangka Pemikiran

Sektor perikanan Kabupaten Banyuwangi melingkupi tiga subsektor, yaitu subsektor perikanan laut, tambak dan perikanan air tawar. Pembangunan perikanan dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan adanya program dari Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan sektor perikanan, dan penerimaan devisa dari sektor perikanan memberikan kontribusi yang berarti, serta sektor perikanan di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang cukup besar. Namun pada akhir-akhir ini hasil perikanan di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan terutama pada hasil tangkapan yang

disebabkan adanya *over fishing* dan kurangnya pemanfaatan sumberdaya perikanan lainnya. Sedangkan permintaan terhadap produk perikanan terus meningkat. Sehingga, agar diperoleh hasil perikanan yang memiliki kuantitas dan kualitas yang tinggi, dibutuhkan suatu model perencanaan pembangunan.

Konsep keterpaduan program pembangunan ekonomi menjadi semakin penting dalam era globalisasi ini. Hubungan antar kegiatan ekonomi menunjukkan keterkaitan yang kuat dan dinamis. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lain. Begitu pula kemajuan di dalam sektor perikanan, tak lepas dari peran hubungan yang kuat antar subsektor di dalamnya serta sektor lain yang mendukung dan terdukung olehnya. Berbagai hubungan antar kegiatan ekonomi tersebut dapat direkam dalam suatu instrumen statistik yang dikenal dengan tabel input output (tabel I-O).

Model input-output dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan dari masing-masing subsektor perikanan. Dalam hal ini, subsektor yang memiliki keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan tertinggi merupakan subsektor yang memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan perikanan Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam penyusunan PDRB. Dengan demikian, hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan perikanan di Kabupaten banyuwangi di masa mendatang.



Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan Perikanan di Banyuwangi



3. METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian

Ruang lingkup dilakukan untuk membatasi bahasan agar obyek penelitian tidak terlalu luas. Selain itu, fokus penelitian berguna untuk menentukan apakah data penelitian yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibahas tentang:

- ❖ Gambaran umum dan keadaan ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi subsektor perikanan laut, tambak dan perikanan air tawar.
- ❖ Analisis keterkaitan antar subsektor perikanan dengan menggunakan tabel input-output Banyuwangi tahun 2004.

Obyek penelitian adalah tabel input output Kabupaten Banyuwangi tahun 2004. Tabel ini dibuat dengan cara mengkonversi nilai PDRB tabel input output Jawa Timur tahun 2000.

Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output 100 x 100. Mengingat lingkup penelitian ini hanya terbatas pada sektor perikanan saja, maka sektor non perikanan dikelompokkan menjadi sembilan (9) sektor berdasarkan PDRB Banyuwangi. Sektor non perikanan tersebut antara lain adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Di dalam 100 sektor tersebut tergabung 3 sektor perikanan dan 97 sektor non perikanan. Dari 97 sektor non perikanan tersebut diagregasi menjadi 9 sektor non perikanan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 12 sektor yang dianalisis,

yaitu 3 sektor perikanan dan 9 sektor non perikanan. Adapun yang dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini adalah hasil analisis terhadap 3 sektor perikanan.

3.2 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kasus. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, sistematis, faktual, dan valid mengenai data-data yang berupa fakta-fakta dan sifat populasi tertentu dari suatu kegiatan (Suryabrata, 1992). Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu bila mengambil studi perbandingan. Riset deskriptif hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum (Marzuki, 1988). Studi kasus adalah uraian atau penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial (Mulyana, 2001).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2004 dan tabel input output Jawa Timur periode tahun 2000. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta gambaran umum dan sektor perikanan yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan studi literatur.

3.4 Metode Analisa Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini ada dua langkah, yang pertama adalah membuat tabel input output kabupaten Banyuwangi tahun 2004 dengan cara mengkonversi nilai PDRB yang ada pada tabel input output Jawa Timur tahun 2000 dengan PDRB kabupaten Banyuwangi tahun 2004. Langkah kedua adalah menghitung daya penyebaran dan derajat kepekaan dengan menggunakan matriks pengganda. Daya penyebaran dikenal juga dengan istilah *backward linkage* atau tingkat keterkaitan ke belakang, dan derajat kepekaan dikenal dengan istilah *forward linkage* atau tingkat keterkaitan ke depan.

Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar sektor sehingga dihasilkan subsektor kunci pembangunan perikanan kabupaten Banyuwangi, maka perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut :

1. Menghitung Matriks Pengganda

a. Menghitung Koefisien Input

Untuk menghitung matriks pengganda, tahap awal yang perlu dilakukan adalah menghitung koefisien input yang didefinisikan sebagai:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad \dots\dots (3.1)$$

di mana

a_{ij} = Koefisien input sektor i oleh sektor ke j

x_{ij} = Penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j (dalam nilai rupiah)

X_j = Total input sektor ke j (dalam nilai rupiah); total output (X_i)

i = Sektor 1,2,3,4,.....,12 dalam bentuk baris

j = Sektor 1,2,3,4,.....,12 dalam bentuk kolom

Melalui matriks berikut :

Tabel 2. Matriks Input Output 12 x 12 Sektor

Struktur Input	Alokasi Output	Permintaan Antara				Permintaan Akhir	Jumlah Output
		Sektor Produksi					
		Sektor1	Sektor 2	Sektor 12		
Input Antara		Kuadran I				Kuadran II	
Sektor 1		X_{11}	X_{12}	...	X_{121}	F_1	X_1
Sektor 2		X_{21}	X_{22}	...	X_{212}	F_2	X_2
...	
Sektor 12		X_{121}	X_{122}	...	X_{1212}	F_{12}	X_{12}
Input Primer		Kuadran III					
		V_1	V_2	...	V_{12}		
Jumlah Input		X_1	X_2	...	X_{12}		

Dalam suatu tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen, matriks koefisien input yang merupakan kumpulan berbagai koefisien input disebut sebagai matriks A^d .

a. Menghitung $(I - A^d)$

Setelah memperoleh matriks A^d , tahap selanjutnya untuk memperoleh matriks pengganda adalah menguraikan matriks I (matriks identitas) dengan matriks A^d , yaitu dengan mengurangi masing-masing sel yang berpasangan.

Tabel 3. Matriks Identitas (12 x 12)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & . & . & . & 0 \\ 0 & 0 & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & . & . & . & 1 \end{pmatrix}$$

b. Menghitung Matriks Pengganda

Matriks pengganda didefinisikan sebagai matriks kebalikan (*inverse matrix*) dari $(I - A^d)$.

$$B = (I - A^d)^{-1} \dots\dots (3.2)$$

di mana :

B = Matriks pengganda

A^d = Matriks koefisien input domestik (yang diperoleh dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen)

Untuk proses pengolahan data, pada penelitian ini menggunakan bantuan alat *Input-Output (I-O) Software for Dos*.

2. Dampak Keterkaitan Ke Belakang (*Backward Linkage Effect*)

Pada tabel I-O, hubungan antara output dan permintaan akhir adalah sebagai berikut,

$$X = (I - A^d)^{-1} F^d \dots\dots (3.3)$$

Jika diuraikan dalam bentuk matriks, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ X_i \\ \cdot \\ \cdot \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdot & b_{1j} & \cdot & b_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{i1} & \cdot & b_{ij} & \cdot & b_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{n1} & \cdot & b_{nj} & \cdot & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1^d \\ \cdot \\ \cdot \\ F_i^d \\ \cdot \\ \cdot \\ F_n^d \end{pmatrix} \dots\dots (3.4)$$

di mana

b_{ij} = Sel matriks kebalikan $(I - A^d)^{-1}$ pada baris I dan kolom j

X_i = Output sektor i

F_i^d = Permintaan akhir domestik sektor i.

i = Sektor 1,2,3,4,.....,12 dalam bentuk baris

j = Sektor 1,2,3,4,.....,12 dalam bentuk kolom

Pada persamaan (3.4) dapat dilihat bahwa perubahan 1 unit F_i^d akan menimbulkan dampak perubahan terhadap X_1 sebesar b_{11} , terhadap X_2 sebesar b_{21} , dan seterusnya.

Begitu juga perubahan 1 unit F_2^d menimbulkan dampak perubahan terhadap X_1 sebesar b_{12} ; terhadap X_2 sebesar b_{22} , dan seterusnya. Secara umum jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi adalah:

$$r_j = b_{1j} + b_{2j} + \dots + b_{nj} = \sum_{i=1}^n b_{ij} \quad \dots\dots (3.5)$$

di mana

r_j = Jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir sektor j terhadap output seluruh sektor ekonomi

b_{ij} = Dampak yang terjadi terhadap output sektor i akibat perubahan permintaan akhir sektor j

Jumlah dampak dalam persamaan (3.5) disebut juga sebagai jumlah daya penyebaran; dan besaran ini menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor-sektor produksi di suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan persamaan (3.5) selanjutnya dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor :

$$Y_j = \left(\frac{r_j}{n} \right) = \left(\frac{1}{n} \right) \sum_{i=1}^n b_{ij} \quad \dots\dots (3.6)$$

di mana

Y_j = rata-rata dampak terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir sektor j .

Akan tetapi karena sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor saling berbeda satu sama lain, maka persamaan (3.5) dan (3.6) bukan merupakan ukuran yang sah untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor. Untuk keperluan perbandingan,

maka persamaan (3.6) harus dinormalkan (*normalized*), yaitu dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dihasilkan dari proses ini disebut sebagai indeks daya penyebaran yang diformulasikan sebagai :

$$\alpha_j = \frac{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n b_{ij}}{\left(\frac{1}{n^2}\right) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}}$$

atau

$$\alpha_j = \frac{\sum_{i=1}^n b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} \dots\dots (3.7)$$

dimana α_j adalah indeks daya penyebaran sektor j dan lebih dikenal sebagai daya penyebaran sektor j.

Besaran α_j dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar 1 atau lebih kecil dari

1. Bila $\alpha_j = 1$, hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai $\alpha_j > 1$ menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor; dan sebaliknya $\alpha_j < 1$ menunjukkan daya penyebaran sektor j lebih rendah. Dalam banyak analisis tabel I-O, α_j disebut juga sebagai tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkages effect ratio*).

3. Dampak Keterkaitan Ke Depan (*Forward Linkage Effect*)

Berdasarkan persamaan (3.4) dapat juga dilihat bahwa dampak yang terjadi terhadap output sektor 1 (X_1) sebagai akibat perubahan satu unit F_1^d adalah b_{11} ; sebagai akibat perubahan satu unit F_2^d sebesar b_{12} ; dan seterusnya. Dampak terhadap X_2 sebagai akibat

perubahan satu unit F_1^d sebesar b_{21} , sebagai akibat perubahan unit F_2^d sebesar b_{22} , dan seterusnya. Sehingga, jumlah dampak terhadap output suatu sektor i sebagai akibat perubahan permintaan akhir berbagai (seluruh) sektor dapat dituliskan dalam bentuk persamaan :

$$\begin{aligned}
 b_{11} + b_{12} + \dots + b_{1j} + \dots + b_{1n} &= \sum_{j=1}^n b_{1j} \\
 b_{21} + b_{22} + \dots + b_{2j} + \dots + b_{2n} &= \sum_{j=1}^n b_{2j} \\
 b_{n1} + b_{n2} + \dots + b_{nj} + \dots + b_{nn} &= \sum_{j=1}^n b_{nj}
 \end{aligned}
 \dots\dots (3.8)$$

Atau dalam persamaan umum:

$$s_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \dots\dots (3.9)$$

di mana

s_i = jumlah dampak terhadap sektor i sebagai akibat perubahan seluruh sektor.

Nilai s_i pada persamaan (3.9) disebut juga sebagai jumlah derajat kepekaan, yaitu besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Oleh karena besaran ini menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian, maka ukuran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke depan (*forward linkages*).

Untuk keperluan perbandingan antar aktivitas produksi dan logika yang serupa dengan pembahasan daya penyebaran, maka persamaan (3.9) dinormalkan menjadi:

$$\beta_i = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} \dots\dots (3.10)$$

di mana

β_i = indeks derajat kepekaan sektor i atau lebih sering disebut sebagai derajat kepekaan saja.

Nilai $\beta_i > 1$ menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor i lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor, sedangkan $\beta_i < 1$ menunjukkan derajat kepekaan sektor i lebih rendah dari rata-rata. Indeks derajat kepekaan disebut juga sebagai tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkages effect ratio*).

4. Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan

Sektor yang mempunyai tingkat dampak keterkaitan ke depan yang tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan sektor yang lainnya. Sedangkan sektor yang mempunyai tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain.

Tingkat dampak keterkaitan ke depan memberikan indikasi bahwa sektor yang mempunyai indeks lebih besar dari 1, menunjukkan tingkat keterkaitan di atas rata-rata. Pengertian yang sama juga berlaku untuk tingkat dampak keterkaitan ke belakang. Sektor yang mempunyai indeks lebih dari satu, berarti sektor tersebut memiliki keterkaitan ke belakang di atas rata-rata secara keseluruhan.

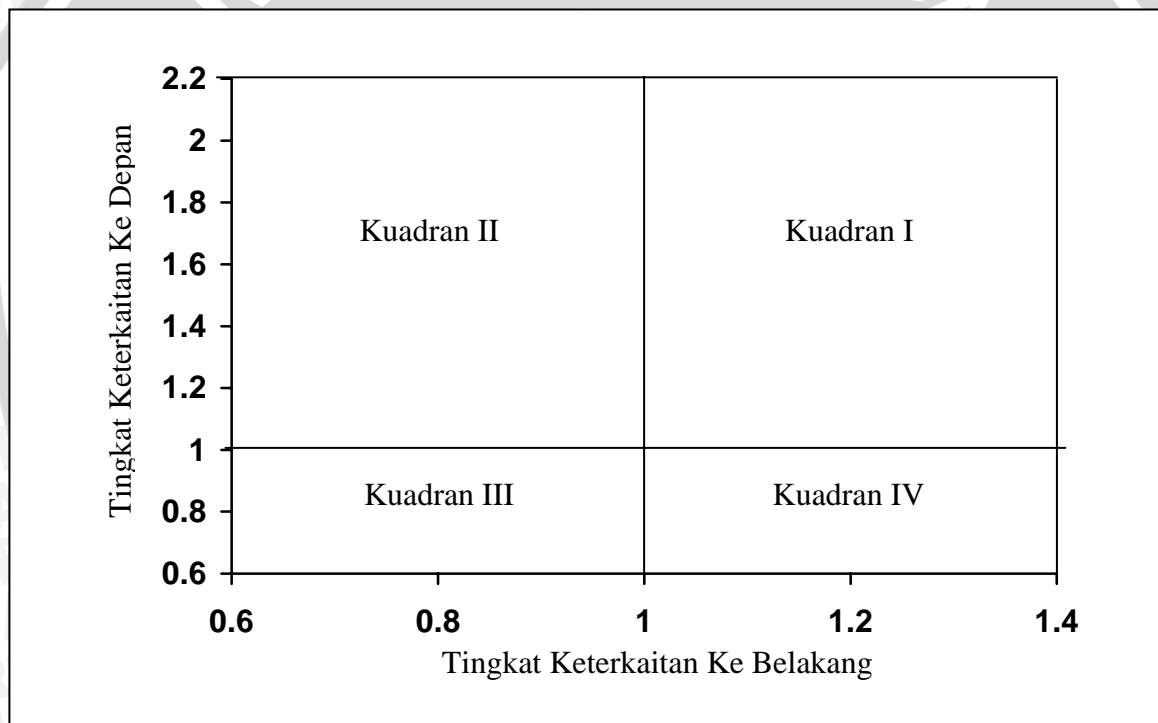
Berdasarkan Tingkat dampak keterkaitan ke depan dan tingkat dampak keterkaitan ke belakang, subsektor perikanan kabupaten banyuwangi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kuadran, sebagai berikut:

- a. Kuadran I adalah sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang relatif tinggi (di atas rata-rata)
- b. Kuadran II adalah sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan yang tinggi (di atas

- rata-rata), tetapi keterkaitan ke belakangnya rendah (di bawah rata-rata)
- Kuadran III adalah sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang relatif rendah (di bawah rata-rata)
 - Kuadran IV adalah sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi (di atas rata-rata), tetapi keterkaitan ke depannya rendah (di bawah rata-rata)

Dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembagian posisi masing-masing sektor, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Hubungan Tingkat Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang



Dari hasil yang di dapat, maka sektor usaha yang berada di kuadran I merupakan sektor dengan tingkat keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang tinggi. Sektor ini merupakan sektor unggulan yang representatif untuk mewakili sektor perikanan untuk dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan perikanan Kabupaten Banyuwangi.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

4.1.1. Keadaan Geografis Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibukotanya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini berada di ujung paling timur Pulau Jawa, terletak diantara koordinat $7,43^{\circ}$ – $8,46^{\circ}$ Lintang Selatan (LS) dan $113,53^{\circ}$ – $114,38^{\circ}$ Bujur Timur (BT), berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Indonesia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di barat.

Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah $5.782,5$ km^2 , wilayah ini dibagi dalam 24 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banyuwangi.

4.1.2. Keadaan Topografi dan Jenis Tanah

Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan dataran rendah, sedikit miring arah Barat Laut ke Tenggara. Dataran tinggi terletak di bagian barat dan utara dimana terdapat gunung-gunung yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember. Sedangkan bagian timur dan selatan ± 75 % merupakan dataran rendah persawahan.

Tanah yang ada di kabupaten Banyuwangi merupakan tanah jenis Regosol, Lathosol, Podsolil, dan Gambut.

4.1.3. Iklim

Kabupaten Banyuwangi memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 25° - 30°C , curah hujan antara bulan Nopember sampai dengan bulan April. Setiap tahun dijumpai periode bulan basah dan bulan kering dimana bulan basah dengan curah hujan diatas 180 mm

yaitu bulan Januari dan Maret dengan rata-rata hari hujan 20 dan 25 hari. Sedangkan bulan terkering adalah bulan Agustus, September dan April dimana hari hujan pada bulan kering terdapat antara 0-5 hari per bulan.

Tabel 3: Curah Hujan dan Hari Hujan tahun 2004

No.	Bulan	Suhu (°C)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	26,9	377,3	18
2.	Februari	26,7	460,4	25
3.	Maret	27,7	100,5	14
4.	April	27,9	101,8	11
5.	Mei	27,4	16,4	11
6.	Juni	26,3	16,1	10
7.	Juli	25,8	86,4	14
8.	Agustus	25,3	28,8	5
9.	September	25,9	15,8	3
10.	Oktober	27,6	0	0
11.	Nopember	29,9	53,5	13
12.	Desember	27,9	297,4	18

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Banyuwangi tahun 2004

4.1.4. Keadaan Wilayah Laut, Pantai dan Sungai

Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah laut dimana Selat Bali yang terletak di sebelah Timur dengan dominasi ikan permukaan (pelagis), dan hasil terbesar lemuru (*Sardinella lemuru*) serta Samudra Indonesia yang terletak di sebelah selatan dengan dominasi ikan dasar (demersal) di samping ikan pelagis.

Demikian pula terdapat pantai sepanjang ± 175 Km merupakan lahan yang potensial bagi Budidaya Air Payau atau tambak, pembenihan udang windu, dan lain-lain.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 81 sungai dengan panjang keseluruhan mencapai ± 735 Km yang berfungsi untuk pertanian, perikanan, air minum dan lain-lain.

Sungai-sungai tersebut ada yang bermuara di Selat Bali yaitu sungai Lo, sungai Setail, sungai Kalibaru, sungai Sepanjang, serta sungai Kempit dan lain-lain. Selain sungai juga

terdapat 7 (tujuh) waduk dengan luas mencapai 4,0 Ha serta 2 (dua) rawa luasnya mencapai 1,50 Ha.

4.1.5. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas adalah Suku Osing, namun terdapat Suku Madura dan Suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas Suku Bali dan Suku Bugis. Suku Osing merupakan perpaduan dari Jawa, Madura, dan Bali. Mereka menggunakan Bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua Bahasa Jawa.

Berdasarkan data dari Badan Statistik dan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 sebesar 1.553.261 jiwa dari jumlah penduduk sebesar itu yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan dan nelayan sebesar 26.427 orang atau 1,7% dengan rincian: pembudidaya ikan sebesar 6.165 orang atau 23,3 %, nelayan sebesar 18.839 orang atau 71,4%, nelayan perairan umum sebesar 1.423 orang atau 5,4 %.

Kondisi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan berada di 9 (sembilan) Kecamatan berpantai yaitu: Wongsorejo, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi dan Tegaldlimo, sedangkan untuk pembudidaya tambak (payau) berada di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Banyuwangi, Kabat, Pesanggaran, Rogojampi, Tegaldlimo, Wongsorejo dan Muncar. Pembudidaya ikan air tawar terdapat di hampir semua kecamatan sewilayah Kabupaten Banyuwangi.

4.2. Keadaan Umum Perikanan di Kabupaten Banyuwangi

4.2.1. Perikanan Laut

1. Penangkapan Ikan di laut

Kabupaten Banyuwangi yang dibatasi oleh Selat Bali di sebelah timur dan Samudra Indonesia di sebelah selatan merupakan salah satu daerah perikanan utama di Jawa Timur. Selat Bali yang luasnya 960 mil² memiliki potensi penangkapan maksimum lestari untuk ikan pelagis (permukaan) dengan hasil ikan yang dominan yakni Lemuru (*Sardinella Lemuru*) sebesar 46.400 ton per tahun, sedangkan jumlah yang boleh ditangkap dalam rangka pengelolaan berkelanjutan yaitu 80% sekitar 25.120 ton per tahun. (sumber: Hasil Penelitian PPIS–Unibraw 2004), sedangkan untuk jenis ikan dasar (demersal), ikan hias, nener dan benur belum ada penelitian, namun demikian sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Sedangkan Samudra Indonesia yang luasnya ± 2 juta mil² (belum termasuk perairan Mintakat Zone 200 mil) dengan basis utamanya daerah Pancer dan Grajagan memiliki potensi lestari sebesar 212.500 ton per tahun yang terdiri dari ikan demersal sebesar 103.000 ton per tahun dan ikan permukaan sebesar 109.500 ton per tahun.

Pengembangan usaha penangkapan di perairan pantai yang masih potensial dilaksanakan melalui motorisasi dan modernisasi unit penangkapan. Jenis alat tangkap yang dikembangkan adalah trammel net, gill net, pancing rawai dan mini purse seine dengan menggunakan perahu motor tempel dan kapal motor. Disamping itu akan ditempuh pula usaha diversifikasi melalui perbaikan teknis penangkapan dan penggunaan beberapa jenis alat tangkap pada setiap unit penangkapan untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Pengembangan usaha perikanan lepas pantai dikembangkan di perairan pantai selatan yang terutama diarahkan pada pengembangan unit penangkapan gill net, long line (pancing Rawai), pole and line dan purse seine dengan menggunakan kapal motor lebih dari 20 GT (Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, 2004).

2. Budidaya Perikanan Laut

a. Budidaya Rumput laut

Untuk kegiatan budidaya rumput laut terletak di wilayah perairan laut Kecamatan Wongsorejo. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam budidaya rumput laut harus memperhatikan beberapa faktor antara lain: musim, kecepatan arus, tinggi gelombang, kecerahan, salinitas, dan lain-lain. Proses produksi budidaya rumput laut tidak terjadi sepanjang tahun hal ini disebabkan pada bulan tertentu terjadi musim angin (Juni sampai dengan September) dan musim hujan (Nopember sampai dengan Februari) yang berpengaruh terhadap kecerahan dan salinitas. Budidaya rumput laut yang paling efektif di Kecamatan Wongsorejo dilakukan pada awal bulan Maret sampai dengan akhir Juni dan awal bulan Oktober sampai dengan November. Di perairan Kecamatan Wongsorejo telah berkembang \pm 200 unit rakit tiap unit dapat menghasilkan antara 500 kg sampai dengan 600 kg rumput laut jenis *Euchema Cottoni* dan dalam keadaan kering dijual dengan harga Rp. 3.500,00 per kg. Budidaya rumput laut juga terdapat di perairan Teluk Rajekwesi dan telah berkembang \pm 20 unit rakit (Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, 2004).

b. Budidaya Ikan di Karamba Jaring Apung

Untuk kegiatan budidaya karamba jaring apung terletak di wilayah perairan teluk Pangpang kecamatan Muncar. Walaupun masih tingkat awal namun sudah terdapat 12 unit kajapung, dimana setiap unit kajapung terdapat 6 petak dengan ukuran setiap petak

3 x 3 meter dan dari 12 unit kajapung tersebut, 80% kotaknya dipergunakan untuk jenis ikan kerapu dimana dalam 1 unit ditebar \pm 500 ekor. Budidaya karamba jaring apung juga terdapat di perairan Rajegwesi kecamatan Pesanggaran dengan jumlah kajapung \pm 16 unit (Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, 2004).

4.2.2. Tambak

Pengembangan produksi budidaya air payau (tambak) di Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1986, mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan, terutama sekali diarahkan pada ekspor non migas. Pengembangan dilakukan melalui intensifikasi usaha tambak yang sudah ada, tetapi menjelang tahun 1992 produksi budidaya tambak mengalami fluktuasi dikarenakan adanya faktor alami (musim, lingkungan, penyakit, faktor manusia, dan lain-lain), namun dengan adanya introduksi species baru awal tahun 2001 dimana pembudidaya udang Banyuwangi sebagai pioneer sejenis udang putih yaitu *Vannamei* maka para petambak mulai bergairah lagi untuk memproduksi udang (Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, 2004).

Perkembangan banyaknya rumah tangga dan luas lahan tambak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Banyaknya Rumah Tangga dan Luas Areal Tambak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Banyaknya RT	Luas Tambak (ha)
1.	Pesanggaran	10	20
2.	Tegaldlimo	36	45
3.	Muncar	155	549
4.	Rogojampi	20	132
5.	Kabat	13	129
6.	Banyuwangi	36	128
7.	Wongsorejo	69	325
	Total	339	1.328

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi Tahun 2004

4.2.3 Perikanan Air Tawar

1. Budidaya Perikanan Air Tawar

Keberadaan budidaya air tawar di Banyuwangi secara langsung dapat membantu memperbaiki gizi disamping menambah penghasilan bagi petani ikan. Pengembangan produksi budidaya air tawar juga mengalami kemajuan, dimana terjadi pergeseran dari usaha yang hanya untuk kesenangan saja menjadi usaha yang bersifat komersial, dengan jenis komoditas ikan Tombro, Tawes, Gurami, Nila, Lele, dan lain-lain baik untuk ikan konsumsi maupun untuk penyediaan benih bagi usaha budidaya air tawar. Perkembangan usaha budidaya ikan hias di air tawar juga mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan jenis-jenis: Lou Han, Koi, Komet, Koki, dan lain-lain (Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, 2004).

2. Penangkapan Ikan di Perairan Umum

Perikanan air tawar lainnya yaitu penangkapan ikan di perairan umum. Perairan umum di kabupaten Banyuwangi meliputi sungai, waduk, dan rawa. Proses penangkapannya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap jala, bubu, pancing dan lain-lain, yang pada umumnya hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual. Meskipun sudah banyak dilakukan penyuluhan, pembinaan serta tindakan baik preventif maupun kuratif dengan adanya undang-undang no.31 tahun 2004 tentang Perikanan, namun masih ada kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dengan menggunakan listrik, racun atau potas.

4.3. Tinjauan Makro Ekonomi Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Tabel I-O dapat memperlihatkan adanya beberapa kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Oleh karena itu dengan menggunakan Tabel I-O dapat dilakukan berbagai analisis baik analisis deskriptif yang menyangkut struktur produksi, nilai tambah, arus barang dan jasa (*supply-demand*), analisis keterkaitan antar sektor dan beberapa analisis lainnya.

Untuk mengetahui secara umum keadaan perekonomian sektor perikanan di Banyuwangi pada tahun 2004, maka bab ini akan menganalisis secara singkat mengenai struktur permintaan, struktur penawaran, struktur output dan struktur nilai tambah barang dan jasa sektor perikanan, serta perhitungan keterkaitan antar sektor.

4.3.1. Struktur Permintaan Sektor Perikanan

Pada tahun 2004, permintaan terhadap produk perikanan di Kabupaten Banyuwangi mencapai 445 milyar rupiah yang terdiri atas permintaan antara, permintaan akhir domestik, dan untuk memenuhi permintaan ekspor baik ke luar negeri maupun ke daerah lain. Permintaan akan produk oleh sektor perikanan dalam rangka proses produksi (permintaan antara) mencapai 173 milyar rupiah atau sekitar 38,87% dari seluruh permintaan produk. Selanjutnya permintaan oleh konsumen akhir domestik (konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan perubahan stok) sebesar 239 milyar rupiah atau mencapai 53,71%. Permintaan terkecil adalah permintaan untuk ekspor (baik ke luar negeri maupun ke daerah lain) yang mencapai 32,8 milyar rupiah atau sekitar 7,37% dari seluruh permintaan.

Struktur permintaan dari subsektor perikanan yang terbesar adalah perikanan darat mencapai 162,1 milyar rupiah. Perikanan tambak mencapai 158,7 milyar rupiah, kemudian perikanan laut sebesar 124,3 milyar rupiah.

Tabel 5: Struktur Permintaan Sektor Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004

Subsektor	Permintaan (Milyar Rp)				Distribusi Permintaan (%)			
	Antara	Akhir Domestik	Ekspor	Jumlah	Antara	Akhir Domestik	Ekspor	Jumlah
Perikanan laut	36,54	54,91	32,8	124,25	29,41	44,19	26,39	100
Tambak	45,65	113,08	0	158,73	28,76	71,24	0	100
Perikanan darat	90,93	71,17	0	162,12	56,08	43,89	0	100
Jumlah	173,12	239,16	32,8	445,1	38,89	53,73	7,37	100,00

Sumber: Diolah sendiri

4.3.2. Struktur Penawaran Sektor Perikanan

Penyediaan untuk memenuhi seluruh permintaan akan komoditi perikanan berasal dari produksi domestik (produksi kabupaten Banyuwangi) dan berasal dari produksi luar kabupaten Banyuwangi (impor). Dari total permintaan sebesar 445 milyar rupiah yang mampu disediakan dari produksi kabupaten Banyuwangi (produksi domestik) sebesar 231 milyar rupiah atau sekitar 51,9% dari seluruh penyediaan/penawaran sektor perikanan di kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sebesar 214 milyar rupiah atau sekitar 48,1% didatangkan dari luar kabupaten Banyuwangi.

Hasil penangkapan maupun budidaya perikanan Banyuwangi belum mampu memenuhi jumlah permintaan di daerahnya sendiri, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan pengolahan perikanan di Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan dalam jumlah besar ikan untuk memenuhi target produksinya.

Struktur penyediaan menurut sektor ekonomi sama dengan struktur permintaan, dimana penyediaan subsektor perikanan darat merupakan yang terbesar. Untuk memenuhi permintaan perikanan air tawar sebesar 162 milyar rupiah disediakan dari produksi Banyuwangi sendiri sebesar 118 milyar rupiah atau 72,8% dari total penyediaan dan sisanya sebesar 44 milyar rupiah atau 27,2 persen didatangkan dari luar Banyuwangi. Sedangkan untuk memenuhi permintaan sektor tambak sebesar 158,7

milyar rupiah yang berasal dari Banyuwangi sendiri sebesar 17,5 milyar rupiah atau 11% dan sisanya 141,2 milyar rupiah atau 88,9% berasal dari luar Banyuwangi. Permintaan sektor perikanan laut sebesar 124,3 milyar rupiah yang berasal dari kabupaten Banyuwangi sendiri sebesar 95,4 milyar rupiah atau 76,8% dan sisanya 28,8 juta rupiah atau 23,2% berasal dari luar Banyuwangi.

**Tabel 6: Struktur Penyediaan Hasil Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2004**

Subsektor	Penyediaan (Milyar Rp)			Distribusi Penyediaan (%)		
	Impor	Produksi Domestik	Jumlah	Impor	Produksi Domestik	Jumlah
Perikanan laut	28,83	95,41	124,24	23,2	76,79	100
Tambak	141,17	17,56	158,73	88,94	11,06	100
Perikanan air tawar	44	118,1	162,1	27,14	72,85	100
Jumlah	214	231,07	445,07	48,08	51,92	100

Sumber: Diolah sendiri

4.3.3. Struktur Output

Output atau keluaran sektor perikanan merupakan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor perikanan di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, dengan menelaah besarnya output yang diciptakan oleh masing-masing subsektor, berarti akan diketahui pula subsektor yang mampu memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan output secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan klasifikasi 12 sektor ekonomi Tabel I-O kabupaten Banyuwangi terlihat bahwa jumlah output tiga subsektor perikanan mencapai 231,1 milyar rupiah, atau sekitar 2% dari seluruh output yang diciptakan di kabupaten Banyuwangi yang mencapai 11,38 milyar rupiah.

4.3.4. Struktur Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto adalah balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. Dalam Tabel I-O, nilai tambah ini dirinci menurut upah/gaji, surplus usaha (sewa, bunga dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung neto. Besarnya nilai tambah setiap sektor ekonomi dipengaruhi oleh besarnya output (nilai produksi) yang dihasilkan serta jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, suatu sektor yang memiliki output yang besar belum tentu memiliki nilai tambah yang besar, tetapi tergantung biaya produksi yang dikeluarkannya.

Subsektor Perikanan air tawar memberikan kontribusi terbesar dibanding subsektor perikanan lainnya dalam menciptakan nilai tambah bruto sektor perikanan di kabupaten Banyuwangi, yaitu sebesar 113,9 milyar rupiah sekitar 50,9%. Kemudian diikuti dengan subsektor perikanan laut sebesar 93,5 milyar rupiah atau 41,8%, dan tambak sebesar 16,2 milyar rupiah atau 7,2%. Nilai tambah bruto sektor perikanan (PDRB perikanan) yang tercipta di Banyuwangi sebesar 223,7 milyar rupiah.

Untuk total nilai tambah yang tercipta menurut komponennya, yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung, komponen upah/gaji memberikan andil yang cukup besar terhadap pembentukan nilai tambah perikanan (PDRB perikanan) Banyuwangi sebesar 51,3% PDRB perikanan Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang diterima oleh pekerja cukup tinggi dibandingkan lainnya. Sedangkan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto memberikan kontribusi masing-masing sebesar 42,1%, 5,7% dan 0,8%.

Tabel 7: Nilai Tambah Bruto (PDRB) Sektor Perikanan Menurut Komponennya Tahun 2004

Kode I-O	Sektor	Nilai	Peranan
		(Milyar Rp)	(%)
201	Upah/gaji	114,87	51,35
202	Surplus usaha	94,26	42,14
203	Penyusutan	12,87	5,75
204	Pajak tak langsung	1,67	0,75
209	Nilai tambah bruto	223,673	99,99

Sumber: Diolah sendiri

4.3.5. Struktur Permintaan Akhir

Dalam tabel I-O, permintaan akhir dirinci menurut komponennya, yaitu konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor. Jumlah komponen permintaan akhir tersebut dikurangi dengan impor akan sama dengan jumlah penggunaan akhir barang dan jasa yang berasal dari faktor produksi domestik atau PDRB menurut penggunaan.

Jumlah permintaan akhir (*final demand*) sektor perikanan kabupaten Banyuwangi tahun 2004 sebesar 271,9 milyar rupiah. Dari jumlah tersebut didistribusikan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 239 milyar rupiah atau 87,9% dari total permintaan akhir, distribusi untuk konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tidak ada, sedangkan perubahan stok 0,14 milyar rupiah atau 0,05% dan ekspor 32,8 milyar rupiah atau 12,1%.

Tabel 8: Struktur Permintaan Akhir (PA) Sektor Perikanan Menurut Komponennya Tahun 2004

Kode IO	Sektor	Nilai (Milyar Rp)	Persentase Terhadap PA (%)
301	Konsumsi rumah tangga	239,03	87,9
302	Konsumsi pemerintah	0	0
303	Pembentukan modal	0	0
304	Perubahan stok	0,143	0,05
305	Ekspor	32,8	12,1
309	Permintaan akhir	271,97	100
409	Impor	214,02	78,7

Sumber: Diolah sendiri

Perbandingan antara produksi perikanan yang diekspor dengan yang diimpor menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan yang diimpor lebih besar dari yang diekspor. Ini berarti arus produksi perikanan di kabupaten Banyuwangi menunjukkan arus masuk. Arus ini secara tidak langsung sebagai indikator kuatnya permintaan perikanan domestik kabupaten Banyuwangi.

4.4 Hasil Perhitungan Keterkaitan Sektoral

Dalam penentuan subsektor kunci pembangunan, maka seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap tabel input-output dengan menentukan kaitan ke belakang (*backward linkage*) serta kaitan ke depan (*forward linkage*) dari ketiga subsektor perikanan. Suatu subsektor dikatakan memiliki keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang tinggi apabila nilai keduanya lebih dari 1, dan dikatakan rendah apabila nilai keduanya kurang dari 1.

Kemudian ketiga subsektor ditempatkan pada kuadran seperti yang telah dijelaskan pada bab metodologi penelitian, subsektor yang menempati posisi kuadran I memiliki

nilai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang tinggi, subsektor ini merupakan subsektor unggulan yang nantinya bisa menjadi kunci pembangunan.

Subsektor yang terdapat pada kuadran II dan kuadran IV merupakan subsektor potensial. Disebut potensial karena setidaknya mempunyai satu keterkaitan sektoral yang tinggi. Kuadran II merupakan kelompok aktivitas produksi yang memiliki nilai keterkaitan ke depan yang tinggi dengan nilai keterkaitan ke belakang yang rendah. Sedangkan kuadran IV merupakan kelompok aktivitas produksi yang memiliki nilai keterkaitan depan yang rendah dengan nilai keterkaitan ke belakang yang tinggi.

Adapun kuadran III merupakan kelompok aktivitas produksi yang memiliki nilai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang rendah. Aktivitas produksi yang tersebar pada daerah ini merupakan aktivitas produksi tertinggal, yaitu aktivitas produksi lain di luar kategori aktivitas produksi unggulan dan potensial.

4.4.1 Keterkaitan Ke Belakang

Sebagaimana prasyarat dalam perhitungan keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, maka aktivitas produksi yang memiliki hasil lebih besar dari 1 (>1) diidentifikasi sebagai aktivitas produksi unggulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari hasil pengolahan data input output (IO), tambak memiliki keterkaitan ke belakang yang melampaui kriteria tersebut, yaitu dengan nilai 1,3661. Sedangkan perikanan laut dan perikanan darat lainnya memiliki keterkaitan ke belakang kurang dari 1, masing-masing memiliki nilai 0,9164 dan 0,6017.

Tambak mempunyai keterkaitan ke belakang tertinggi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa subsektor tambak mempunyai daya dorong yang paling kuat dibandingkan dengan subsektor perikanan laut dan perikanan air tawar. Hal ini dapat

diilustrasikan bahwa akibat kenaikan 1 unit permintaan akhir subsektor tambak, akan menyebabkan kenaikan output seluruh sektor sebesar 1,3661 unit.

Produksi tambak di Banyuwangi banyak dihasilkan dari budidaya intensif, dengan jenis komoditinya udang windu, udang putih, udang *vannamae*. Produksi tambak yang dilakukan secara intensif ini banyak menyerap input dari sektor lain.

Perikanan laut belum mampu menyerap input dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan tangkap Banyuwangi hanya memakai alat tangkap sederhana, sehingga kebutuhan terhadap sektor lain tidak terlalu besar. Budidaya rumput laut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun, sehingga transaksi yang dilakukan dengan sektor lain kecil.

Perikanan air tawar memiliki nilai keterkaitan ke belakang yang sangat rendah, jauh dari angka 1, hal ini disebabkan produksi sampai tahun 2004 paling banyak didapatkan dari perairan umum, dimana di perairan umum hanya dilakukan penebaran ikan dan pemancingan, sedangkan intensifikasi budidaya belum dilakukan secara optimal. Sedangkan budidayanya yaitu kolam, minapadi, karamba dan balai benih ikan masih memakai cara sederhana, karena minimnya modal dan pengetahuan petani ikan mengenai teknis budidaya modern.

4.4.2 Keterkaitan Ke Depan

Untuk tingkat keterkaitan ke depan, berdasarkan prasyarat penilaian yang telah disampaikan terdahulu, subsektor perikanan mulai dari perikanan air tawar, kemudian tambak, dan perikanan laut semuanya memiliki nilai keterkaitan ke depan yang tinggi yaitu 1,5410, 1,2674, dan 1,2587, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan mempunyai kepekaan atau ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya, terutama perusahaan-perusahaan pengolahan ikan. Di kabupaten banyuwangi terdapat

banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pengalengan ikan	11 perusahaan
2.	Cold Storage	19 perusahaan
3.	Pemindangan	99 perusahaan
4.	Pengasinan	28 perusahaan
5.	Peng-es-an ikan	58 perusahaan
6.	Tepung ikan mekanik	28 perusahaan
7.	Tepung ikan tradisional	71 perusahaan
8.	Pembuatan trasi	2 perusahaan
9.	Pembuatan petis	5 perusahaan
10.	Hatchery	5 perusahaan

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi Tahun 2004

Produk perikanan memiliki banyak sekali keutamaan, selain bisa dikonsumsi langsung juga bisa diolah menjadi bermacam-macam produk lainnya, misalnya makanan olahan, tepung ikan, kosmetik, obat-obatan, perhiasan dan lain-lain, sehingga sektor perikanan memiliki pohon industri yang cukup luas dalam rangka mendiversifikasi produksinya semakin jauh sebelum dipasarkan ke konsumen akhir.

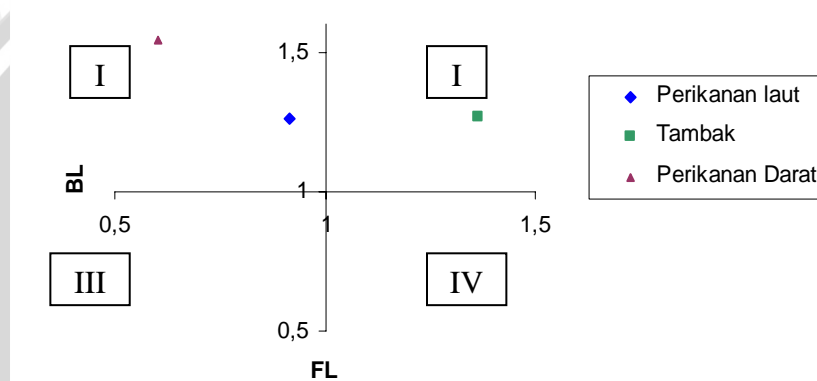
Dari hubungan keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan tersebut dapat diketahui subsektor perikanan yang mampu menghidupkan banyak sektor dengan keberadaannya.

4.5 Penentuan Subsektor Kunci Pembangunan Perikanan

Pada hakekatnya subsektor kunci pembangunan perikanan merupakan subsektor yang diharapkan dapat menghidupkan banyak sektor lainnya, baik sektor pendukung input maupun sektor pengguna outputnya. Subsektor ini selain diharapkan dapat melibatkan banyak sektor dalam pengadaan produknya, juga mampu mendorong sektor

lain untuk membuat diversifikasi produk dengan anggota subsektor ini sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, subsektor kunci merupakan subsektor yang harus memiliki keduanya, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan yang tinggi.

Dari hasil analisis input output yang telah dilakukan, maka diketahui subsektor yang memiliki karakteristik sebagai subsektor kunci berdasarkan hubungan keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakangnya, yaitu subsektor tambak. Hal ini bisa diamati dalam bentuk kuadran sebagaimana berikut:



Gambar 2. Sebaran Subsektor

Dari hasil pemetaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tambak terdapat dalam kuadran I, sedangkan perikanan laut dan perikanan air tawar terdapat di kuadran II. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan di depan, bahwa kuadran I merupakan daerah sebaran aktivitas produksi yang memiliki tingkat keterkaitan sektoral tinggi. Dengan kata lain yang ada di dalamnya merupakan kombinasi dari subsektor dengan tingkat keterkaitan ke belakang yang tinggi dan tingkat keterkaitan ke depan yang tinggi.

Berdasarkan kuadran tersebut, diketahui bahwa tambak menjadi unggulan sektor perikanan di kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004. Hubungan yang paling erat adalah dengan sektor perusahaan pengolah udang, cold storage, industri terasi, jenis usaha perdagangan, dimana tambak menyediakan output yang paling besar bagi sektor tersebut. Tambak juga memiliki hubungan yang erat dengan sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan, dimana tambak menggunakan input yang terbesar dari sektor tersebut.

Perikanan laut dan perikanan air tawar meskipun memiliki keterkaitan ke belakang rendah, namun sangat berpotensi untuk dikembangkan.

4.6 Tambak Sebagai Subsektor Kunci Pembangunan Perikanan

Melalui penelitian terhadap hubungan keterkaitan sektoral ini dapat diketahui ketangguhan suatu sektor dalam mempengaruhi sektor lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian kabupaten Banyuwangi. Dan dari tiga subsektor perikanan, ditemukan bahwa subsektor tambak merupakan subsektor kunci pembangunan perikanan Banyuwangi. Subsektor kunci akan dapat menunjukkan fungsi strategisnya dalam membantu pembenahan perekonomian ini dengan alokasi kebijakan ekonomi yang berdampak ekspansif, baik melalui kebijakan yang berdampak langsung pada produksi subsektor kunci maupun melalui intensifikasi produksi sektor-sektor komplementernya dengan memanfaatkan hubungan interdependensi terhadap subsektor kunci. Dengan adanya kecenderungan ekspansi produksi subsektor tambak maka secara otomatis mekanisme peningkatan produksi sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan subsektor tambak akan berjalan. Hubungan transaksi yang sudah terjalin erat (ditandai dengan tinggi jumlah transaksi) antar sektor-sektor usaha dengan subsektor tambak akan segera bereaksi positif terhadap ekspansi tersebut, yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi sektor-sektor usaha terkait. Reaksi ini terjadi karena ekspansi subsektor kunci berarti perluasan pasar domestik bagi sektor-sektor usaha yang berkaitan dengannya.

Salah satu tujuan penentuan subsektor kunci ini adalah untuk fokus pengalokasian dana pembangunan yang terbatas. Namun bukan berarti subsektor kunci terpilih adalah

subsektor yang bisa dijadikan patokan strategi jangka panjang pembangunan perikanan ke depan. Dengan hanya menggunakan data input-output sebagai sumber data analisis, subsektor tambak hanya efektif sebagai pendorong pembangunan perikanan dalam jangka pendek. Jika subsektor tambak dijadikan sentral kebijakan pembangunan perikanan maka upaya pembangunan jangka panjang justru terhambat pada pengembangan jaringan produksi tambak saja. Oleh karena itu pembangunan perikanan tidak bisa menggantungkan pada pembangunan tambak secara terus-menerus namun justru harus menumbuhkembangkan potensi subsektor lainnya, sehingga sektor perikanan kelak bisa menjadi sektor kunci pembangunan di kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial.

Sebagai subsektor kunci pembangunan perikanan, tambak mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Kabupaten Banyuwangi diberi karunia berupa keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam memproduksi komoditi tambak. Beberapa keunggulan Kabupaten Banyuwangi tersebut antara lain didasarkan pada kenyataan berikut:

- (a) Banyuwangi memiliki potensi lahan tambak seluas 2279 ha, namun pemanfaatannya baru sekitar 1161 ha. Artinya, tingkat pemanfaatannya baru 50,9%. Hal ini merupakan peluang besar bagi pengusaha tambak dan pemerintah daerah untuk membuka usaha budidaya tambak baru, sehingga hasil produksinya meningkat.
- (b) Budidaya tambak di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara tradisional, semi intensif dan intensif. Jenis komoditi yang dihasilkan antara lain: udang, kepiting, kerapu, bandeng, belanak, dan lain-lain. Budidaya udang memiliki peluang usaha yang baik karena sangat digemari konsumen baik lokal, luar daerah maupun luar

negeri. Hal ini disebabkan oleh rasa udang yang enak dan gurih serta kandungan gizinya yang sangat tinggi. Daging udang diperkirakan mengandung 90% protein. Menurut Hirota (1990), protein dalam daging udang mengandung asam amino esensial cukup lengkap. Keunggulan udang lainnya adalah kandungan lemaknya hanya sedikit.

(c) Jumlah pengusaha tambak yang ada di kabupaten banyuwangi pada tahun 2004 mencapai 182 pengusaha.

Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tambak merupakan subsektor kunci pembangunan perikanan Banyuwangi diperkuat dengan kenyataan bahwa secara keseluruhan pada periode tahun 2000-2003 produksi tambak meningkat, meskipun pada tahun 2004 mengalami penurunan namun pada tahun 2005 produksinya kembali meningkat.

Subsektor tambak juga merupakan subsektor andalan dalam menyumbang devisa karena mempunyai orientasi pasar ekspor. Kenyataan ini bertitik tolak dari besarnya permintaan produk hasil tambak, terutama udang, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Sampai saat ini, udang masih merupakan primadona ekspor hasil perikanan Indonesia. Peluang pasar udang cukup terbuka, terlebih lagi karena Indonesia terbebas dari kebijakan anti dumping. Pada tahun 2004, kontribusi udang hasil budi daya terhadap ekspor hasil perikanan mencapai 87.917 ton dengan nilai US\$ 545,88 juta atau sekitar 70%, baik dalam volume maupun nilai, dari total ekspor udang Indonesia sebesar 125.596 ton dengan nilai US\$ 779,8 juta (Suara Pembaruan Daily, 2006).

Ketertarikan konsumen terhadap udang tidak sebatas pada rasa dagingnya yang lezat. Limbah dari bagian tubuh udang juga menjadi daya tarik tersendiri. Bagian kepala dan cangkangnya (*carapace*) bisa memberi nilai tambah yang cukup berarti. Limbah kulit

udang ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri, seperti industri farmasi, kosmetika, pangan, dan tekstil. Salah satu kandungan kulit udang yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri adalah *chitin* dan *chitosan* (senyawa turunan dari *chitin*). Kulit udang mengandung *chitin* 10-60 % dari berat keringnya. Pasar utama *chitin* di dunia adalah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman (Amri, 2003).

Pengembangan ekspor hasil tambak terutama udang di pasar internasional menghadapi dua persoalan utama, yakni hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Menurut Dahuri (2002), hambatan tarif meliputi masalah yang berkaitan dengan bea masuk yang diberlakukan suatu negara terhadap negara lain. Sementara itu, hambatan non tarif mencakup persoalan perizinan ekspor, sertifikasi kesehatan, standar sanitasi, dan standar mutu. Persoalan non tarif seperti standar kesehatan, standar sanitasi, dan standar mutu pernah menjegal udang ekspor asal Indonesia di pasar Internasional. Contohnya ada embargo negara tertentu terhadap ekspor udang Indonesia yang disinyalir mengandung bakteri dan zat-zat kimia.

Persoalan non tarif lainnya adalah masalah lingkungan. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Uni Eropa (UE) gigih mengkampanyekan anti budidaya udang di tambak karena pembuatan tambak dianggap merusak mangrove dan membahayakan kelestarian lingkungan. Persaingan ketat di pasar internasional tidak berarti mengecilkan peluang pasar udang Indonesia khususnya Banyuwangi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah khususnya daerah Banyuwangi bisa membuat konsep pedoman lingkungan untuk rehabilitasi tambak. Pedoman tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum manajemen budidaya udang yang dikembangkan melalui *World Bank/NACA/WWF/FAO Consortium Program on Shrimp Farming and the Environment*, dan disesuaikan dengan kondisi khas lingkungan dan sosial pertambakan

di Banyuwangi. Seperti yang diterapkan di Aceh konsep pedoman rehabilitasi tambak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tambak harus dibuat di wilayah dengan lingkungan yang sesuai untuk budidaya ikan dan udang. Pembangunan tambak tidak boleh membawa dampak yang merugikan bagi keanekaragaman hayati, habitat yang secara ekologis rawan dan fungsi ekosistem. Diperlukan pula kejelasan status tanah secara hukum agar tambak tidak dibangun di wilayah sabuk hijau atau yang diperuntukkan sabuk hijau.
2. Rehabilitasi tambak dan pasokan air harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk di antaranya risiko pencemaran asam sulfat dan rusaknya sistem pasokan air. Desain tambak harus diupayakan agar memadukan wilayah penyangga, misalnya habitat alam bakau, dengan kolam-kolam tambak. Demikian pula teknik dan rekayasa yang diterapkan harus dapat meminimalkan erosi, pencemaran asam sulfat dan salinasi selama proses konstruksi, rehabilitasi dan operasi dilaksanakan.
3. Rehabilitasi sistem pasokan air harus dilaksanakan sedemikian rupa agar dapat menjamin cukupnya persediaan air dan sistem penyaluran yang diperlukan. Kehati-hatian juga sangat diperlukan agar tidak terjadi perembesan air tambak ke wilayah pertanian agrikultur, jika jarak keduanya berdekatan. Demikian pula dampak lokasi yang terkait dengan pembuangan limbah cair dan padat harus diminimalkan.
4. Pencarian benih dari alam dan sistem hatchery benih udang maupun bandeng harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak. Sebaliknya perlu dilakukan praktek hatchery yang dapat meningkatkan kualitas benih udang dan bandeng.
5. Pakan dan manajemen pemberian pakan harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien. Pakan dan pupuk harus

dimanfaatkan secara efisien agar dapat mempertahankan kesuburan tambak dan tidak menyebabkan degradasi kualitas air atau berdampak negatif pada kesehatan atau keamanan pakan udang atau ikan yang dibudidayakan.

6. Risiko penyakit terhadap ikan dan udang tangkap maupun budidaya harus diminimalkan melalui penebaran benih ikan dan udang yang sehat. Pengelola hatchery dan petambak harus diberi pelatihan tentang cara-cara sederhana untuk mengurangi risiko serangan penyakit terhadap ikan dan udang dengan tetap berpegang pada upaya menjaga kualitas lingkungan.
7. Penggunaan bahan kimia yang cenderung menimbulkan residu atau ancaman terhadap lingkungan harus dihindari. Meskipun antibiotik tidak biasa dipergunakan di dalam pertambakan tradisional, penggunaan bahan-bahan kimia untuk persiapan tambak sering dilakukan dan untuk itu harus dicarikan alternatif solusinya dan selanjutnya dimasyarakatkan.
8. Rehabilitasi dan operasi tambak harus dilakukan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Rehabilitasi, selain memang sangat diperlukan untuk mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir, juga harus dilakukan agar dapat memaksimalkan lapangan pekerjaan dan keuntungan sosial bagi masyarakat serta dapat mengindarkan terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan rancangan yang sensitif untuk menanggapi berbagai masalah sosial.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sektor perikanan mencakup 3 subsektor besar, yaitu subsektor perikanan laut, tambak, dan perikanan air tawar. Perikanan laut terdiri dari: penangkapan dan budidaya, penangkapan di Selat Bali sudah dinyatakan padat tangkap, sedangkan di Samudra Indonesia perlu dilakukan perintisan dan ditingkatkan beberapa kali lipat, budidaya perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari budidaya rumput laut dan budidaya karamba jaring apung. Budidaya rumput laut terdapat di kecamatan Wongsorejo dan di perairan Teluk Rajekwesi, pada tahun 2004 total jumlah rakit yang berkembang ± 220 unit, jenis rumput laut yang dihasilkan adalah *Euchema Cottoni*. Budidaya ikan di karamba jaring apung terdapat di perairan teluk Pangpang kecamatan Muncar dan di perairan Rajegwesi kecamatan Pesanggaran, pada tahun 2004 total jumlah karamba jaring apung ± 28 unit, 80% kotaknya dipergunakan untuk jenis ikan kerapu. Tambak di Banyuwangi dikelola oleh 339 rumah tangga dengan jumlah total luas tambak 1.328 ha, potensi yang dimiliki seluas 2.279 ha, tambak ini masih memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Perikanan darat terdiri dari: penangkapan ikan di perairan umum dan budidaya air tawar.
2. Struktur permintaan dari subsektor perikanan pada tahun 2004 yang terbesar adalah perikanan air tawar mencapai 162,1 milyar rupiah. Sedangkan tambak sebesar 158,7 milyar rupiah, dan perikanan laut sebesar 124,3 milyar rupiah. Untuk memenuhi permintaan perikanan air tawar tersebut disediakan dari produksi Banyuwangi sendiri sebesar 72,8% dari total penyediaan dan sisanya 27,2% didatangkan dari luar

Banyuwangi. Sedangkan untuk memenuhi permintaan sektor tambak yang berasal dari Banyuwangi sendiri sebesar 11% dan 88,9% berasal dari luar Banyuwangi. Permintaan sektor perikanan laut yang berasal dari kabupaten Banyuwangi sendiri 76,8% dan sisanya 23,2% berasal dari luar Banyuwangi. Jumlah output tiga subsektor perikanan Banyuwangi sekitar 2% dari seluruh output yang diciptakan di kabupaten Banyuwangi.

3. Tambak sebagai subsektor kunci pembangunan perikanan di Kabupaten Banyuwangi tidak bisa dijadikan patokan strategi jangka panjang pembangunan perikanan Banyuwangi ke depan, karena penggunaan data input output sebagai sumber data analisis, membatasi ruang analisis hanya pada kondisi data yang dipergunakan. Hal ini disebabkan data input output sifatnya statis sehingga tidak dapat melihat gejala perekonomian di antara periode data input output apalagi memprediksi kondisi ke depan.

5.2 Saran

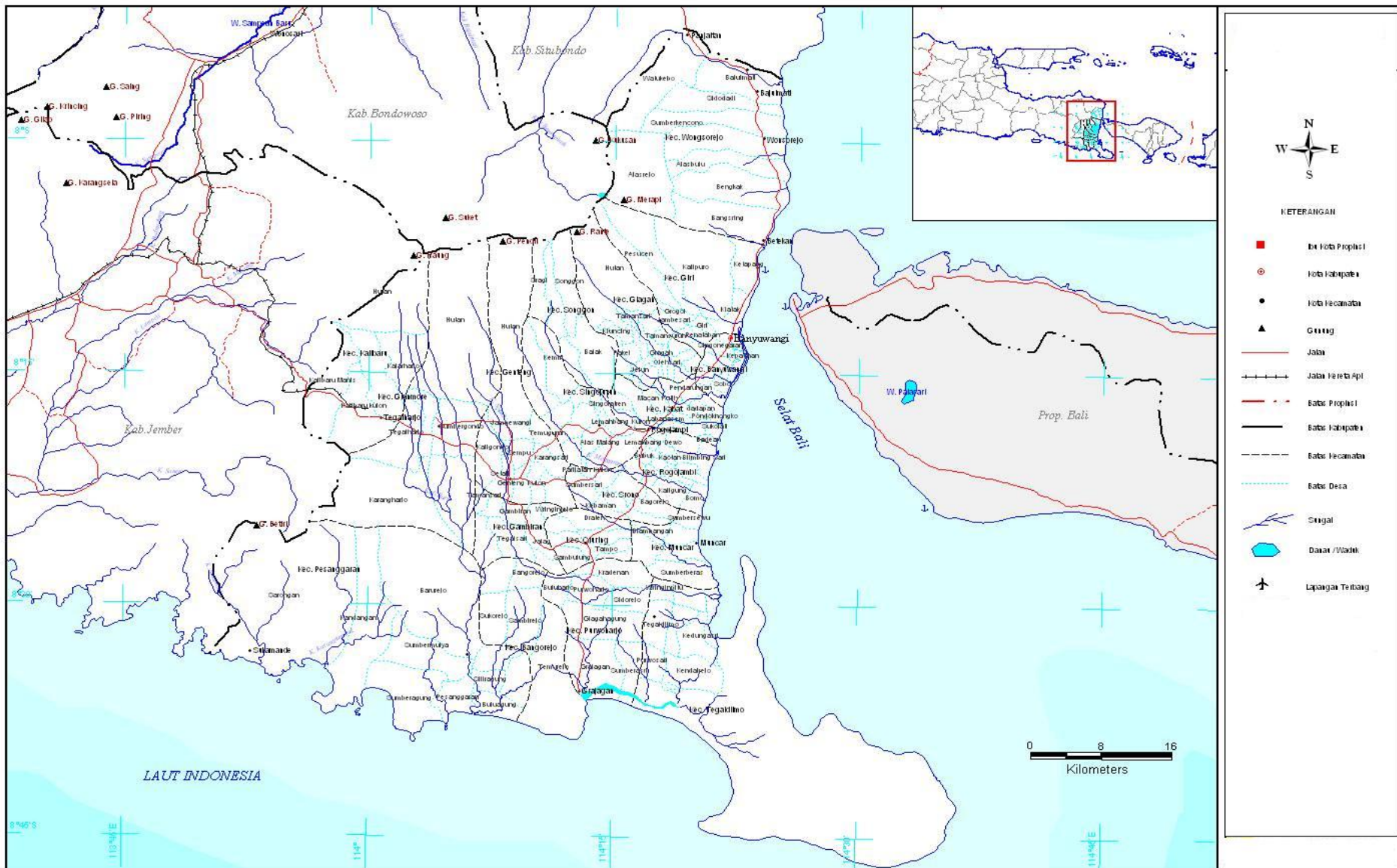
1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah Banyuwangi dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi tambak, penyediaan modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghindari menurunnya kualitas hasil tambak, dan juga melakukan intensifikasi produksi sektor-sektor komplementernya.
2. Menumbuhkembangkan potensi subsektor perikanan laut dan perikanan air tawar, yaitu dengan melakukan perintisan penangkapan di perairan Samudra Indonesia, ZEE dan perairan umum lainnya.

3. Perlu kiranya dilakukan perluasan penelitian di bidang perikanan, khususnya subsektor tambak, agar didapatkan hal-hal baru yang dapat menunjang perkembangan sektor ini.



Lampiran 1

PETA KABUPATEN BANYUWANGI



Lampiran 2

Jumlah Penduduk, Petani Ikan dan Nelayan Kabupaten Banyuwangi

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Petani Ikan dan Nelayan			Jumlah
			Petani Ikan	Nelayan Laut	Perairan umum	
1.	Wongsorejo	71.871	236	1.148	-	1.384
2.	Giri	28.009	17	-	31	48
3.	Kalipuro	69.493	10	357	-	401
4.	Banyuwangi	104.623	685	771	13	1.469
5.	Glagah	32.217	83	-	277	350
6.	Kabat	66.429	222	132	60	404
7.	Rogojampi	93.225	399	1.602	48	2.049
8.	Singojuruh	48.006	70	-	60	130
9.	Songgon	50.377	27	-	35	62
10.	Sempu	72.749	125	-	31	156
11.	Genteng	83.702	260	-	127	387
12.	Glenmore	70.212	142	-	185	328
13.	Kalibaru	57.752	208	-	151	359
14.	Gambiran	57.801	562	-	78	640
15.	Cluring	70.299	93	-	123	216
16.	Srono	86.862	82	-	101	183
17.	Muncar	125.951	2.068	10.707	-	12.775
18.	Tegaldlimo	64.738	279	405	-	684
19.	Purwoharjo	64.806	-	2.691	-	2.691
20.	Bangorejo	60.569	515	-	53	568
21.	Pesanggaran	47.759	55	1.026	12	1.093
22.	Silir Agung	46.301	3	-	15	18
23.	Tegalsari	43.522	11	-	7	18
24.	Licin	27.911	20	-	15	35
	Jumlah	1.553.261	6.165	18.839	1.386	26.345

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004

Lampiran 3

Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Perikanan di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Alat Tangkap	Kecamatan									Jumlah
		Wong sorejo	Kali puro	Banyuwangi	Kabat	Rogojampi	Muncar	Tegal dlimo	Purwoharjo	garan	
1	Purse Seine	-	-	-	-	-	190	-	35	4	229
2	Payang Besar	-	-	-	-	-	93	-	30	15	138
3	Payang Oras	16	30	24	16	-	-	-	-	15	101
4	Jaring Insang Multifilament	51	50	55	3	30	204	28	120	15	556
5	Jaring Insang Multifilament	65	30	27	35	32	507	57	125	162	1040
6	Pancing Rawai	-	-	-	-	-	165	-	35	48	248
7	Pancing	125	315	275	256	175	494	75	63	337	2115
8	Bagan Tancap	-	-	-	-	-	142	-	-	-	142
9	Sero	-	-	-	-	-	195	45	-	-	240
10	Solok	150	75	45	35	30	-	-	-	-	335
11	Tok Tor	-	16	19	-	-	-	-	-	-	35
12	Bubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jala	50	40	35	36	34	57	58	15	60	385
14	Jermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lain-lain	4	-	-	-	-	454	148	-	-	606
17	Bagan	-	-	-	-	-	174	-	-	-	-
Jumlah		461	556	480	381	301	2.675	401	422	656	6.070

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi tahun 2004

Lampiran 4

**Banyaknya Rumah Tangga dan Luas Areal Budidaya Air Tawar
di Kabupaten Banyuwangi**

No	Kecamatan	Kolam		Mina padi		Karamba	
		Orang	Ha	Orang	Ha	Orang	Ha
1.	Pesanggaran	184	6,75	31	2,50	3	3
2.	Siliragung	22	1,43	-	-	-	-
3.	Bangorejo	140	6,91	64	5,20	9	40
4.	Purwoharjo	187	6,31	30	3,20	-	-
5.	Tegaldlimo	75	5,67	6	2,40	-	-
6.	Muncar	104	3,50	6	0,70	-	-
7.	Cluring	80	4,96	11	1,80	3	3
8.	Gambiran	154	6,15	31	4,40	6	10
9.	Tegalsari	32	3,26	6	2,10	-	-
10.	Glenmore	136	13,75	66	19,30	44	59
11.	Kalibaru	155	9,86	20	12,50	16	25
12.	Genteng	163	9,74	40	7,20	24	35
13.	Srono	107	14,87	26	4,20	-	-
14.	Rogojampi	91	7,35	54	3,99	4	5
15.	Kabat	108	6,30	16	4,30	3	7
16.	Singojuruh	52	4,72	26	6,50	1	2
17.	Sempu	78	9,86	55	9,00	6	11
18.	Songgon	93	6,22	120	7,10	3	5
19.	Glagah	63	4,06	7	2	2	5
20.	Licin	52	3,51	19	3,20	3	3
21.	Banyuwangi	77	5,20	-	-	-	-
22.	Giri	33	2,35	5	1,20	-	-
23.	Kalipuro	30	2,11	-	-	-	-
24.	Wongsorejo	69	2,05	-	-	-	-
Total		2.239	146,89	639	102,79	122	213

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi tahun 2004

Lampiran 5

**Produksi Budidaya Tambak Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2000-2005**

No.	Tingkat Teknologi Budidaya	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)					
			2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Tradisional & Semi intensif	Udang Windu	390	290	285	200	150	137
		Udang Putih	60	172	184	160	0	0
		Udang <i>Vannamae</i>	0	0	0	150	315	530
		Kepiting	56	70	72	97	63	29
		Kerapu	5	8	12	15	8	12
		Bandeng	4	7	7	12	5	2
		Belanak	2	3	2	2	1	1
		Lain-lain	12	14	18	35	27	15
2	Intensif	Udang Windu	2150	1763	1400	867	395	175
		Udang Putih	400	300	206	0	0	0
		Udang <i>Vannamae</i>	0	550	1050	2023	2240	2700
		Kepiting						
		Kerapu						
		Bandeng						
		Belanak						
		Lain-lain						
Jumlah			3081	3174	3239	3563	3206	3601

Lampiran 6

Hasil Perhitungan Keterkaitan Sektoral Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004

Kode Sektor	Sektoral	BL	FL
1	Pertanian	1.4341	1.2377
2	Perikanan Laut	0.9164	1.2587
3	Tambak	1.3661	1.2674
4	Perikanan Air Tawar	0.6017	1.541
5	Pertambangan dan Penggalian	0.8245	1.2151
6	Industri Pengolahan	1.1646	1.1018
7	Listrik, Gas dan Air bersih	0.7017	0.8431
8	Konstruksi	0.7848	0
9	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.0896	0.964
10	Pengangkutan dan Komunikasi	1.0175	1.0098
11	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.1588	0.8541
12	Jasa-jasa	0.9401	0.7073



Lampiran 7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	180
1	1810511	924	830	7831	266233	14770507	0	0	5552951	7466	0	71181	22488434
2	0	27	2	31	0	172494	0	0	247956	722	0	398	421630
3	0	32	10623	11926	0	150635	0	0	336301	671	0	1696	511884
4	0	0	398	2890	0	854752	0	0	160941	207	0	412	1019600
5	0	0	0	0	251676	1774658	23491	735286	0	0	0	0	2785111
6	2221672	87406	3632	103949	726925	31384729	905803	4875573	5637432	2727582	555974	1362676	50593353
7	11977	1797	522	4041	14263	1699879	856310	219694	890503	18187	69029	268693	4054895
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	493631	13587	772	9643	244365	6559538	377542	719787	1607194	586072	631751	691519	11935401
10	392257	3466	974	7731	239759	7159949	628424	886499	3956021	260123	150502	98714	13784419
11	108573	3059	1650	3122	168863	686417	190384	241255	1358789	54716	112656	33238	2962722
12	125710	3645	1487	9686	39080	416490	80868	39787	611651	57064	84562	242085	1712115
190	5164322	113941	20892	160849	1951164	65629861	3062822	7717880	20359742	3712804	1604432	2770612	112269321
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	18068552	581201	90264	632965	1481101	15857560	1300257	4152970	10280999	2767278	1635068	9741005	66589220
202	12545362	458179	76340	535325	1544593	16188180	1306660	3467638	16206907	6161100	4644441	5333767	68468492
203	1174697	33992	13888	97393	500170	2622012	801248	240309	8346522	937460	310732	706567	15784990
204	1658458	5788	1643	11512	60049	10774317	685540	107953	4331525	769951	228370	202868	18837974
209	33447072	1079161	182136	1277195	3585914	45442069	4093703	7968869	39165956	10635789	6818610	15984156	169680628
210	38611398	1193103	203028	1438044	5537079	111071927	7156524	15686749	59525696	14348604	8423041	18755470	281950658

Tabel Input Output Jawa Timur Periode Tahun 2000 yang Diagregasi

301	302	303	304	305	307	308	309	310	407	408	409
19024880	2852	395156	6253105	1186739	13353725	14540464	40216457	62704891	1709025	22385154	24094179
690913	0	0	405	0	412933	412933	1104251	1525881	0	332778	332778
1272946	0	0	1104	0	0	0	1274050	1785934	0	1582905	1582905
911678	0	0	163	0	0	0	911841	1931441	0	493396	493396
0	0	0	127023	617049	3962364	4579413	4706436	7491547	641443	1313035	1954478
48034711	1613692	14392222	921771	35356223	41378330	76734553	141696949	192290302	37161498	44056840	81218338
1569251	322312	0	0	0	1507213	1507213	3398776	7453671	0	297140	297140
1272960	493174	13920615	0	0	0	0	15686749	15686749	0	0	0
26117281	458879	2355245	746534	10799852	8008066	18807918	48485857	60421258	895565	0	895565
3256055	331106	0	0	233355	277803	511158	4098319	17882738	391114	3143028	3534142
5457717	8007	0	0	3836	0	3836	5469560	8432282	4930	4111	9041
7235240	7433289	0	0	1834704	1715483	3550187	18218716	19930831	527966	647396	1175362
114843632	10663311	31063238	8050105	50031758	70615917	120647675	285267961	397537282	41331541	74255783	115587324

501	503	509	600	700
0	0	0	38610712	38611400
0	0	0	1193103	1193103
0	0	0	203029	203025
0	0	0	1438045	1438045
0	0	0	5537069	5537077
0	0	0	111071964	111072117
0	0	0	7156531	7156527
0	0	0	15686749	15686751
0	0	0	59525693	59525692
0	0	0	14348596	14348599
0	0	0	8423241	8423085
0	0	0	18755469	18754819
0	0	0	281949958	281950240



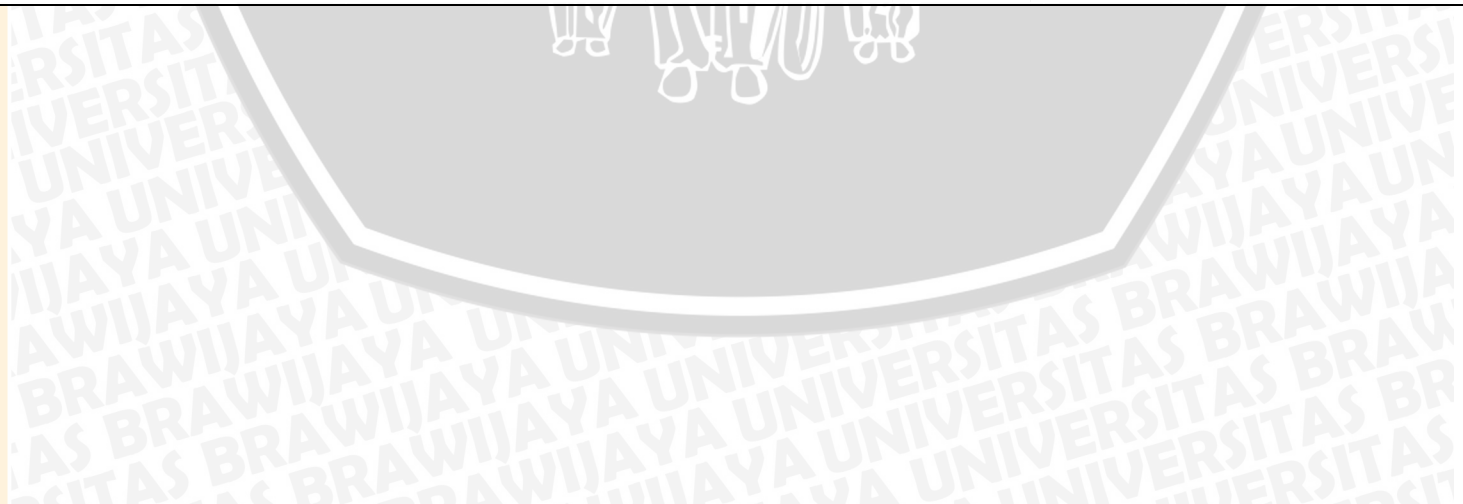
Lampiran 8

Tabel Koefisien Input Jawa Timur Tahun 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	180
1	0,0805085	4,109E-05	3,6908E-05	0,0003482	0,0118387	0,6568046	0	0	0,2469248	0,000332	0	0,0031652	0,67235882
2	0	6,404E-05	4,7435E-06	7,352E-05	0	0,40911225	0	0	0,5880891	0,0017124	0	0,000944	0,39070167
3	0	6,251E-05	0,02075275	0,0232982	0	0,29427566	0	0	0,6569867	0,0013108	0	0,0033133	2,81044933
4	0	0	0,00039035	0,0028344	0	0,83832091	0	0	0,1578472	0,000203	0	0,0004041	0,79831193
5	0	0	0	0	0,0903648	0,63719471	0,0084345	0,264006	0	0	0	0	0,77668092
6	0,0439123	0,0017276	7,1788E-05	0,0020546	0,014368	0,62033305	0,0179036	0,0963679	0,1114263	0,0539119	0,010989	0,0269339	1,11335936
7	0,0029537	0,0004432	0,00012873	0,0009966	0,0035175	0,41921653	0,2111793	0,0541799	0,2196119	0,0044852	0,017024	0,0662639	0,99052007
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0,0413586	0,0011384	6,4682E-05	0,0008079	0,020474	0,54958673	0,0316321	0,0603069	0,1346577	0,0491037	0,052931	0,0579385	0,30473917
10	0,0284565	0,0002514	7,0659E-05	0,0005609	0,0173935	0,51942334	0,0455894	0,0643117	0,2869922	0,0188708	0,010918	0,0071613	1,29604104
11	0,0366464	0,0010325	0,00055692	0,0010538	0,0569959	0,23168458	0,0642598	0,0814302	0,4586286	0,0184682	0,038024	0,0112187	0,43450527
12	0,0734238	0,0021289	0,00086852	0,0056573	0,0228256	0,24326053	0,0472328	0,0232385	0,3572488	0,0333295	0,04939	0,1413953	0,10711326
190													
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	0,5402133	0,5385675	0,49558572	0,4955899	0,4130331	0,3489621	0,3176237	0,5211492	0,2624984	0,2601855	0,239795	0,6094163	
202	0,375081	0,4245696	0,41913735	0,4191412	0,430739	0,35623774	0,3191878	0,4351481	0,4138009	0,57928	0,681142	0,3336909	
203	0,0351211	0,0314985	0,07625071	0,0762554	0,1394819	0,0577001	0,1957269	0,030156	0,2131066	0,088142	0,045571	0,0442042	
204	0,0495845	0,0053634	0,00902073	0,0090135	0,0167458	0,23710005	0,1674621	0,0135468	0,1105941	0,0723925	0,033492	0,0126918	
209	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210													



301	302	303	304	305	307	308	309	310	407	408	409
0,47306206	7,092E-05	0,0098257	0,155486	0,0295088	0,3320463				0,070931	0,929069	0,72036736
0,62568474	0	0	0,000367	0	0,3739485				0	1	0,30836733
0,99913347	0	0	0,000867	0	0				0	1	8,69078601
0,99982124	0	0	0,000179	0	0				0	1	0,38631219
0	0	0	0,026989	0,1311075	0,8419033				0,3281915	0,6718085	0,54504319
0,33899609	0,0113883	0,1015704	0,006505	0,24952	0,2920199				0,4575506	0,5424494	1,78729402
0,46171063	0,0948318	0	0	0	0,4434576				0	1	0,07258465
0,08114875	0,0314389	0,8874124	0	0	0				0	0	0
0,53865772	0,0094642	0,0485759	0,015397	0,2227423	0,1651629				1	0	0,0228659
0,7944855	0,0807907	0	0	0,0569392	0,0677846				0,1106673	0,8893327	0,33228771
0,99783474	0,0014639	0	0	0,0007013	0				0,5452937	0,4547063	0,00132593
0,39713227	0,4080029	0	0	0,1007044	0,0941605				0,4491944	0,5508056	0,07353294



Lampiran 9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	180
1	187191,51	95,533777	85,8149724	809,6591	27526,238	1527145,36	0	0	574128,12	771,92119	0	7359,5127	2325113,67
2	0	2,3397811	0,17331712	2,6864154	0	14948,0818	0	0	21487,51	62,567481	0	34,490107	36537,8489
3	0	2,8539864	947,434292	1063,6451	0	13434,695	0	0	29993,702	59,844527	0	151,26128	45653,4364
4	0	0	35,4966315	257,75192	0	76233,208	0	0	14353,928	18,461816	0	36,745257	90935,5917
5	0	0	0	0	2917,4721	20572,1448	272,31177	8523,5634	0	0	0	0	32285,4921
6	18849,67	741,59204	30,815531	881,95034	6167,5605	266282,238	7685,2424	41366,567	47830,523	23142,04	4717,135	11561,56	429256,894
7	158,79012	23,824484	6,92063464	53,575258	189,09772	22536,8611	11352,89	2912,6856	11806,218	241,1218	915,181	3562,3105	53759,4766
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	23040,172	634,1717	36,0330135	450,08595	11405,709	306165,702	17621,731	33595,978	75015,6	27354,845	29486,91	32276,572	557083,505
10	10482,009	92,61949	26,0275198	206,5901	6406,9118	191330,302	16792,934	23689,292	105713,98	6951,0847	4021,76	2637,8651	368351,374
11	7339,2677	206,78087	111,53594	211,03952	11414,723	46400,1004	12869,49	16308,244	91850,793	3698,667	7615,268	2246,807	200272,718
12	3322,0357	96,323444	39,2957368	255,96403	1032,7353	11006,2417	2137,0327	1051,4186	16163,602	1507,9838	2234,651	6397,3829	45244,6674
190	250383,45	1896,0396	1319,54759	4192,9477	67060,448	2496054,94	68731,632	127447,75	988343,97	63808,537	48990,9	66264,506	4184494,67
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	1868135,3	50366,042	8050,38209	56452,576	17169,181	134542,713	17238,704	21350,765	479864,48	73948,032	110526,6	257417,6	3095062,34
202	1297084,2	39705,133	6808,54127	47744,307	17905,191	137347,842	17323,595	17827,416	756455,57	164638,76	313952,8	140951,11	2957744,46
203	121453,72	2945,6978	1238,63009	8686,2398	5798,0578	22246,3359	10622,882	1235,4486	389572,98	25051,087	21004,72	18671,87	628527,672
204	171470,52	501,57975	146,534363	1026,7267	696,09847	91414,1794	9088,835	554,99537	202173,44	20574,861	15437,25	5361,0273	518446,047
209	3458144,1	93518,539	16244,177	113909,85	41568,54	385551,07	54273,99	40968,62	1828066,6	284212,74	460921,3	422400,26	7199779,71
210	3708527,5	95414,579	17563,7246	118102,8	108628,99	2881606,01	123005,62	168416,37	2816410,6	348021,28	509912,2	488664,77	11384274,4

Tabel Input Output Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004

301	302	303	304	305	307	308	309	310	407	408	409
1832901,63	274,76838	38070,257	602438,8	114333,22	1286529,2	1400862,46	3874547,94	6199661,61	176698,71	2314435,4	2491134,1
54881,8069	0	0	32,17067	0	32800,815	32800,8145	87714,7921	124252,641	0	28838,063	28838,0625
112986,963	0	0	97,99128	0	0	0	113084,954	158738,391	0	141174,67	141174,666
71159,2471	0	0	12,72265	0	0	0	71171,9698	162107,562	0	44004,764	44004,7638
0	0	0	2671,936	12979,66	83348,549	96328,2094	99000,1453	131285,637	7435,719	15220,931	22656,6496
1064936,62	35775,789	319077,68	20435,8	783852,67	917363,67	1701216,34	3141442,23	3570699,13	315294,96	373798,16	689093,12
33790,5711	6940,3216	0	0	0	32454,711	32454,7112	73185,6039	126945,081	0	3939,4586	3939,45858
13666,777	5294,8239	149454,77	0	0	0	0	168416,369	168416,369	0	0	0
1239520,07	21778,29	111779,38	35430,33	512558,46	380060,95	892619,405	2301127,47	2858210,98	41800,396	0	41800,3961
58879,5616	5987,4222	0	0	4219,7813	5023,5389	9243,3202	74110,304	442461,678	10451,465	83988,936	94440,4013
309578,821	454,18215	0	0	217,58995	0	217,589948	310250,594	510523,311	333,25587	277,89349	611,149356
188431,49	193589,39	0	0	47782,245	44677,304	92459,5489	474480,432	519725,1	13952,127	17108,206	31060,3334
4980733,56	270094,99	618382,09	661119,8	1475943,6	2782258,8	4258202,4	10788532,8	14973027,5	565966,64	3022786,5	3588753,11

501	503	509	600	700
0	0	0	3708527,5	6199661,61
0	0	0	95414,5786	124252,641
0	0	0	17563,7246	158738,391
0	0	0	118102,798	162107,562
0	0	0	108628,988	131285,637
0	0	0	2881606,01	3570699,13
0	0	0	123005,622	126945,081
0	0	0	168416,369	168416,369
0	0	0	2816410,58	2858210,98
0	0	0	348021,277	442461,678
0	0	0	509912,162	510523,311
0	0	0	488664,766	519725,1
0	0	0	11384274,4	14973027,5



Lampiran 10

Klasifikasi Sektor
Tabel Input-Output Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004
Jumlah Sektor: 12x12

Kode Sektor	Subsektor	Nama Sektor
1		Pertanian
2	Perikanan Laut	Perikanan
3	Tambak	
4	Perikanan Air Tawar	
5		Pertambangan dan Penggalian
6		Industri Pengolahan
7		Listrik, Gas dan Air bersih
8		Konstruksi
9		Perdagangan, Hotel dan Restoran
10		Pengangkutan dan Komunikasi
11		Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
12		Jasa-jasa
180		Jumlah Permintaan Antara
190		Jumlah Input Antara
200		Impor
201		Upah dan Gaji
202		Surplus Usaha
203		Penyusutan
204		Pajak tak Langsung Neto
209		Nilai Tambah Bruto
210		Jumlah Input
301		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
302		Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
303		Pembentukan Modal Tetap
304		Perubahan Stock
305		Ekspor Barang dan Jasa
307		Ekspor Barang dan Jasa Ke Luar propinsi
309		Jumlah Permintaan Akhir
310		Jumlah Permintaan
407		Impor Barang dan Jasa dari Luar Negeri
408		Impor Barang dan Jasa dari Luar Pulau
409		Jumlah Impor
501		Margin Perdagangan
503		Margin Pengangkutan
509		Jumlah Margin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan
600		Jumlah Output
700		Jumlah Penyediaan